

ROADMAP PASAR MODAL BERKELANJUTAN INDONESIA 2026 - 2030

Mengembangkan ekosistem pasar modal
berkelanjutan yang berdaya saing global

ROADMAP PASAR MODAL BERKELANJUTAN INDONESIA 2026 - 2030

Mengembangkan ekosistem pasar modal
berkelanjutan yang berdaya saing global

DAFTAR ISI

05 Singkatan

06 Sambutan

10 Ucapan Terima Kasih

11 Ringkasan Eksekutif

13 Bab 1 Pendahuluan

21 Bab 2 Gambaran Pasar Modal Berkelanjutan

43 Bab 3 Tantangan dan Peluang Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia

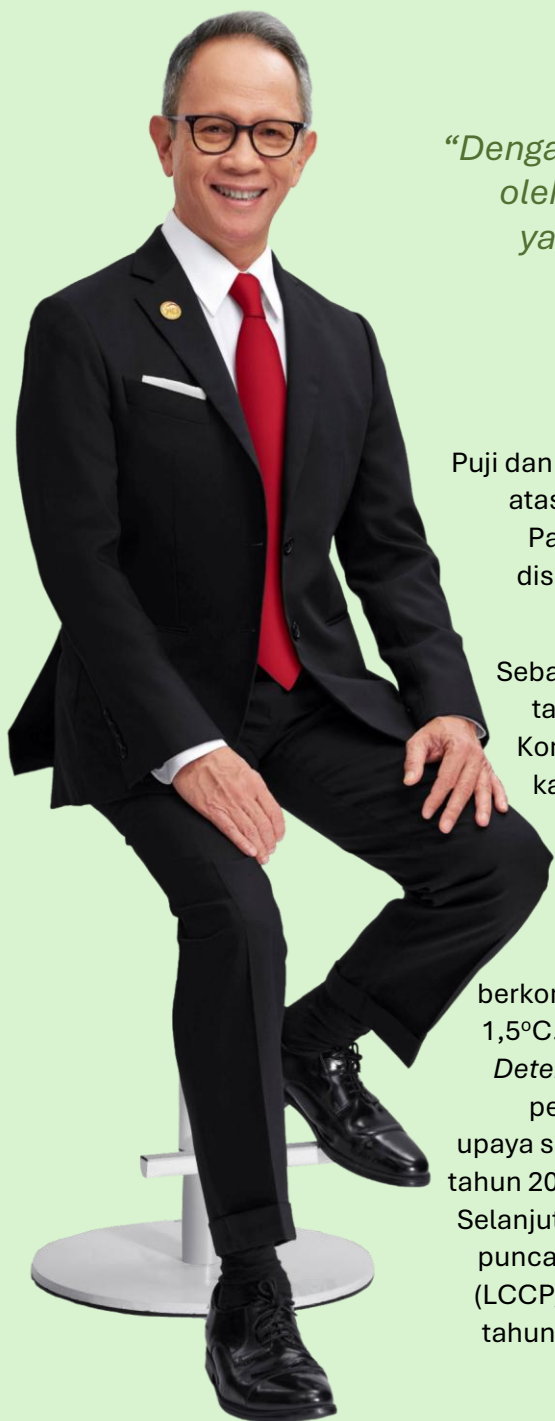
47 Bab 4 *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026 – 2030

SINGKATAN

ACMF	ASEAN Capital Markets Forum
ADB	Asian Development Bank
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
AUM	Asset Under Management
CBI	Climate Bonds Initiative
COMCEC	Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of Organization of the Islamic Cooperation
CRMS	Climate Risk Management & Scenario Analysis
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive
ESG	Environmental, Social, and Governance
GHG	Greenhouse Gas
ICMA	International Capital Market Association
BEI	Bursa Efek Indonesia
IFRS	International Financial Reporting Standards
IOSCO	International Organization of Securities Commissions
IPO	Initial Public Offering
ISSB	International Sustainability Standards Board
MRV	Measurement, Reporting and Verification
NDCs	Nationally Determined Contributions
NZE	Net Zero Emission
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangan Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangan Panjang Nasional
SDGs	Sustainable Development Goals
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SFDR	Sustainable Finance Disclosure Regulation
SPE-GRK	Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
SRN	Sistem Registri Nasional
SROs	Self-Regulatory Organizations
TCFD	Task Force on Climate-related Financial Disclosures
tCO ₂ e	Tonnes of CO ₂ equivalent
TKBI	Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

SAMBUTAN

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN



“Dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK, menjadikan Indonesia sebagai negara yang mature dalam keuangan berkelanjutan di antara negara-negara berkembang.”

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026-2030 ini dapat disusun dan diterbitkan dengan baik sebagai panduan bagi seluruh *stakeholder* di industri Pasar Modal Indonesia.

Sebagaimana telah dirasakan, perubahan iklim memberikan tantangan dan dampak dalam aspek kehidupan manusia. Kondisi ini menuntut adanya transformasi ekonomi rendah karbon dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan sekaligus keseimbangan sosial.

Untuk memitigasi dampak perubahan iklim, melalui *Paris Agreement*, berbagai negara termasuk Indonesia berkomitmen untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C. Sebagai implementasinya, dalam *Enhanced Nationally Determined Contributions (NDCs)*, pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dan target *net zero* pada tahun 2060 atau lebih awal. Selanjutnya dalam *second NDCs 2025*, Indonesia menargetkan puncak emisi karbon pada tahun 2030 mencapai 1,35 GtCO₂e (*LCCP_L scenario*) dan 1,49 GtCO₂e (*LCCP_H scenario*), pada tahun 2035 sebesar 1,26 GtCO₂e (*LCCP_L scenario*) dan 1,49 GtCO₂e (*LCCP_H scenario*).

Sebagai bentuk komitmen dukungan OJK kepada pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan sebagai implementasi atas mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan, OJK mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong pelaku industri jasa keuangan termasuk sektor pasar modal untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan antara lain kebijakan mengenai implementasi keuangan berkelanjutan, instrumen berlandaskan keberlanjutan, taksonomi, bursa karbon, dan kebijakan lainnya. Dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK dan juga kebijakan serta inisiatif keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemangku kepentingan lainnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang progresif dalam keuangan berkelanjutan di antara negara-negara berkembang lainnya. Berdasarkan penilaian dari *Sustainable Banking and Finance Network*, secara keseluruhan keuangan berkelanjutan Indonesia masuk dalam kategori “*maturing*”.¹

Seluruh kebijakan dan inisiatif yang dilakukan semata-mata untuk memfasilitasi pelaku industri keuangan termasuk pasar modal untuk mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek bisnisnya. Hal ini mengingat pelaku pasar modal memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan ekonomi rendah karbon dan berkontribusi dalam pencapaian target *net zero* melalui pasar modal berkelanjutan yang berdaya saing global.

Mewujudkan pasar modal yang berkelanjutan dan berdaya saing global bukanlah hal yang mudah, karena masih dihadapkan berbagai tantangan, seperti terbatasnya pemahaman serta kapasitas pelaku pasar, ketersediaan data, dan tingkat transparansi yang dapat memicu praktik *greenwashing*. Namun demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu peluang yang muncul dari adanya bonus demografi dan target penurunan emisi nasional melalui transisi energi. Hal ini menjadi pendorong utama dalam mempercepat penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan di berbagai sektor ekonomi.

Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam mencapai pasar modal yang berkelanjutan, OJK berkomitmen untuk membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait serta seluruh *stakeholder* di pasar modal dalam menjalankan prioritas dan rencana aksi yang dicakup dalam *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan yang sejalan dengan prioritas dan misi dalam rencana pembangunan nasional. Dengan demikian, Pasar Modal Indonesia akan tumbuh dan berkontribusi dalam memperkuat industri jasa keuangan nasional dan menjadi *market leader* di kawasan regional dan memiliki daya saing global.

MAHENDRA SIREGAR

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

¹ <https://data.sbfnetwork.org/country/indonesia>

SAMBUTAN

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF DAN BURSA KARBON



“Roadmap ini mengubah tantangan menjadi peluang dan memanfaatkan peluang menjadi inisiatif untuk membangun ekosistem pasar modal berkelanjutan yang komprehensif dan tangguh.”

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyelesaikan penyusunan *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026 - 2030. *Roadmap* ini merupakan panduan bagi Otoritas Jasa Keuangan dan para pemangku kepentingan untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan dalam mendukung pemerintah memitigasi dampak perubahan iklim dan mewujudkan kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial.

Perubahan iklim merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, dampaknya dapat dimitigasi meskipun membutuhkan dana yang sangat besar. Menanggapi hal ini, Pasar Modal Indonesia berperan penting untuk menyediakan pendanaan melalui instrumen berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang lebih dikenal dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*.

Sejak 2016, OJK telah menunjukkan komitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan tujuan mencapai penurunan emisi karbon. Berbagai kebijakan dan inisiatif yang menyasar sektor industri jasa keuangan telah dilakukan seperti penerbitan taksonomi hijau dan taksonomi untuk keuangan berkelanjutan Indonesia yang mengklasifikasikan aktivitas bisnis dengan pertimbangan aspek lingkungan dan sosial.

Dari sisi keterbukaan informasi mengenai keberlanjutan, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 dalam rangka mendorong lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan usahanya. Regulasi tersebut mewajibkan pengungkapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam laporan keberlanjutan. Sedangkan inisiatif lainnya termasuk *Guidance for Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) dan kebijakan mengenai pembiayaan kendaraan listrik.

Lebih lanjut, untuk mendukung perusahaan dalam melakukan transisi keberlanjutan, OJK telah menerbitkan Peraturan Nomor 18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan (POJK 18/2023), yang menggantikan Peraturan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). POJK 18/2023 ini merupakan pedoman bagi perusahaan dalam menghimpun dana melalui penerbitan obligasi dan/atau sukuk dengan tema *green, social, sustainability, sustainability-linked*, serta sukuk wakaf. Dengan diterbitkannya POJK 18/2023, Pasar Modal Indonesia berhasil menumbuhkan penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan hingga 39 penerbitan oleh 15 emiten dengan total nilai pencatatan mencapai Rp74,14 triliun per Desember 2025. Di samping itu, penerbitan reksa dana ESG juga turut meningkat dengan jumlah total *Asset Under Management* mencapai Rp9,98 triliun hingga akhir tahun 2025. Selanjutnya, untuk memfasilitasi aktivitas dekarbonisasi, OJK, pemerintah Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada tahun 2023 serta Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia pada tahun 2025. Bursa karbon ini memfasilitasi perdagangan unit karbon antara pelaku pasar domestik dan global. Sebagai capaian terbaik, pada pertengahan 2025, Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) telah mendapatkan penghargaan sebagai *the Best Official Carbon Exchange in an Emerging Economy* dalam ajang *Carbon Positive Awards 2025*.

Setelah melakukan berbagai inisiatif tersebut di atas, OJK masih harus melakukan berbagai upaya dalam rangka memenuhi ekspektasi pasar dan mengikuti perkembangan pasar global. Selain itu, koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara OJK dan pemangku kepentingan juga diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan pasar modal berkelanjutan dari sisi kesadaran, kepatuhan, dan kedalaman pasar produk berkelanjutan. Oleh karena itu, *Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026 – 2030* ini memuat prioritas dan langkah-langkah untuk mendorong keuangan berkelanjutan di Pasar Modal Indonesia. *Roadmap* ini menjadi bukti nyata bahwa OJK mewujudkan komitmennya untuk mengubah tantangan menjadi peluang dan memanfaatkan peluang menjadi inisiatif guna membangun ekosistem pasar modal berkelanjutan yang komprehensif dan tangguh. Dengan hadirnya *Roadmap* ini, atas nama Otoritas Jasa Keuangan, saya mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan berkolaborasi dalam implementasi *Roadmap* ini demi terwujudnya pasar modal berkelanjutan.

INARNO DJAJADI

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan
Derivatif, dan Bursa Karbon

UCAPAN TERIMA KASIH

“Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026 – 2030 ini tidak akan terwujud tanpa masukan, dedikasi, dan kolaborasi dari berbagai individu dan institusi yang berkomitmen untuk memajukan pasar modal berkelanjutan di Indonesia.”

*Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026 – 2030 ini tidak akan terwujud tanpa masukan, dedikasi, dan kolaborasi dari berbagai individu dan institusi yang berkomitmen untuk memajukan pasar modal berkelanjutan di Indonesia. Atas nama OJK, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada *Asian Development Bank (ADB)* atas dukungan bantuan teknis (*technical assistance*) yang sangat berharga melalui *ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF)* dalam penyusunan *Roadmap* ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim ADB serta PwC Luxembourg dan PwC Indonesia selaku konsultan pelaksana yang ditunjuk oleh ADB dalam penyusunan *Roadmap* ini.*

Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta kementerian terkait lainnya, Bank Indonesia, *Self-Regulatory Organizations (SROs)*, *standard-setting bodies*, asosiasi di pasar modal, dan para pemangku kepentingan lainnya, atas keterlibatan dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan penyusunan prioritas dan rencana aksi yang dituangkan dalam *Roadmap* ini.

Akhir kata, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang tiada henti terus menjadi bagian dari perjalanan penerapan keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Semoga *Roadmap* ini dapat berperan tidak hanya sebagai panduan, tetapi juga sebagai katalis dalam membangun pasar modal yang efisien, tangguh, inklusif serta selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

**DEPARTEMEN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN
PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF,
DAN BURSA KARBON**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 merupakan kerangka strategis yang bertujuan mengembangkan ekosistem pasar modal berkelanjutan yang berdaya saing global. Diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap* ini dibangun berdasarkan capaian dari implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I dan II serta *Roadmap* Pasar Modal Indonesia, dan selanjutnya diselaraskan dengan *Nationally Determined Contributions* (NDCs) Indonesia serta target *net-zero emission* pada tahun 2060.

Tujuan Strategis *Roadmap* ini adalah untuk:

- 1. Mengembangkan ekosistem pasar modal berkelanjutan** – *Roadmap* ini bertujuan untuk membangun ekosistem yang komprehensif dalam memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan di pasar modal bagi regulator, pelaku pasar modal, serta pemangku kepentingan lainnya. Ekosistem tersebut mencakup regulasi dan kebijakan, insentif, produk investasi dan pendanaan berkelanjutan, pusat data keberlanjutan, profesi terkait keuangan berkelanjutan, serta infrastruktur pendukung lainnya.
- 2. Mewujudkan pasar modal berkelanjutan yang berdaya saing global** – *Roadmap* ini juga bertujuan untuk menyelaraskan pasar modal berkelanjutan Indonesia dengan standar dan praktik global guna mendorong interoperabilitas dengan pasar internasional, membangun kepercayaan investor, serta memfasilitasi investasi lintas batas pada obligasi, sukuk, dan instrumen karbon yang selaras dengan ESG. Selain itu, *Roadmap* ini juga bertujuan untuk mengembangkan jangkauan, fungsi, dan tata kelola pasar modal berkelanjutan sehingga emiten domestik dapat terdorong untuk berinovasi, melakukan transaksi secara transparan, serta memanfaatkan keuangan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan dengan standar dan praktik internasional juga akan membantu memposisikan Indonesia sebagai pasar modal berkelanjutan yang menarik bagi pelaku pasar internasional.

Untuk mencapai target tersebut, *Roadmap* ini terdiri dari 15 prioritas yang disusun berdasarkan 4 (empat) pilar:

- 1. Pilar I: Memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan** – Tujuan dari pilar ini adalah memperkuat dasar kebijakan dan regulasi pasar modal berkelanjutan.
- 2. Pilar II: Menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan** – Tujuan dari pilar ini adalah mempercepat pertumbuhan dan diversifikasi aktivitas pasar modal berkelanjutan di Indonesia, dengan memperluas penawaran instrumen utang, ekuitas dan produk pengelolaan investasi berkelanjutan, serta produk keuangan transisi dan unit karbon.
- 3. Pilar III: Mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan** – Tujuan dari pilar ini adalah mendukung operasionalisasi kerangka keuangan berkelanjutan serta mendorong penerbitan produk-produk berkelanjutan dengan menyediakan perangkat pendukung dan insentif yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku pasar untuk berpartisipasi dalam pasar modal berkelanjutan.
- 4. Pilar IV: Memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan** – Tujuan dari pilar ini adalah memastikan terjalannya kolaborasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional guna mendukung pengembangan dan pertumbuhan pasar modal berkelanjutan di Indonesia secara berkesinambungan.

BAB 1

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

“Roadmap ini dirancang sebagai living document sehingga fleksibel terhadap dinamika perubahan di pasar global dan pasar domestik.”

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026 – 2030 berperan sebagai panduan bagi OJK dan para pemangku kepentingan untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan. Roadmap ini dirancang sebagai living document sehingga fleksibel terhadap dinamika perubahan di pasar global dan pasar domestik. Selain itu, Roadmap ini juga disusun berdasarkan rencana strategis, target, serta komitmen yang tercantum dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

Komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris

First NDC 2021

29% **41%**
 Dengan upaya sendiri Dengan dukungan internasional

Dicapai pada 2030

Enhanced NDC 2022

31,89% **43,20%**
 Dengan upaya sendiri Dengan dukungan internasional

Dicapai pada 2030

Second NDC 2025

	LCCP_L	LCCP_H
2030	1.345.707 Gg CO ₂ e	1.491.474 Gg CO ₂ e
2035	1.257.717 Gg CO ₂ e	1.488.866 Gg CO ₂ e

Net Zero Emission tercapai pada 2060 atau lebih awal

Industri yang dicakup NDCs

- Energi
- Limbah
- *Industrial processes and product use (IPPU)*
- Agrikultur
- *Forestry and other land use (FOLU)*

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, sebagai bentuk dukungan Indonesia untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C dan menjaga pemanasan global tetap di bawah 2°C di atas tingkat suhu di masa pra-industri.

Sebagai bagian dari Perjanjian Paris, pemerintah Indonesia telah menerbitkan *Nationally Determined Contributions* (NDCs) yang menargetkan penurunan gas rumah kaca sebesar 29% (*unconditional*) dan 41% (*conditional*). Pada tahun 2022, target tersebut ditingkatkan menjadi 31,89% (*unconditional*) dan 43,2% (*conditional*). Selanjutnya pada tahun 2025, ditetapkan *second* NDC yang menargetkan puncak emisi pada tahun 2030 sebesar 1.345.707 Gg CO₂e berdasarkan LCCP_L *scenario* dan 1.491.474 Gg CO₂e berdasarkan LCCP_H *scenario*, dan pada tahun 2035 ditargetkan sebesar 1.257.717 Gg CO₂e (LCCP_L *scenario*) dan 1.488.866 Gg CO₂e (LCCP_H *scenario*). Selain itu, *net zero emission* ditargetkan tercapai pada tahun 2060 atau lebih awal.

Dalam rangka mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi sebagai bagian dari upaya pencapaian *net zero emission* melalui transisi bisnis yang mengintegrasikan aspek ESG. Transisi menuju *net zero* tentu membutuhkan pendanaan yang besar. Kebutuhan pendanaan ini salah satunya dapat diperoleh dari produk berkelanjutan di pasar modal.

Rencana Pembangunan Nasional

Untuk memberikan panduan bagi pembangunan nasional dan mendorong pencapaian target emisi gas rumah kaca yang ditetapkan dalam NDCs, pemerintah merilis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai peta jalan pembangunan Indonesia, termasuk inisiatif keberlanjutan. Dalam RPJPN, terdapat sejumlah strategi utama yang menyoroti aspek ESG. Pada aspek lingkungan, strategi mencakup ekonomi hijau; ketahanan energi, air, dan pangan; serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Pada aspek sosial, strategi mencakup pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selanjutnya, aspek tata kelola, strategi difokuskan pada penguatan kerangka regulasi dan tata kelola yang baik.

Pada tahap pertama pelaksanaan RPJPN melalui RPJMN 2025 - 2029, ekonomi hijau berfokus pada penerapan pembangunan rendah karbon yang mencakup antara lain pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi, pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan, peningkatan cadangan karbon pada ekosistem ekonomi biru, peningkatan upaya dekarbonisasi industri, penguatan aksi pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah, penguatan tata kelola dan faktor pendukung dalam pencapaian pengurangan emisi gas rumah kaca serta nilai ekonomi karbon. Sementara itu, ekonomi biru bertujuan untuk meningkatkan peran strategis klaster maritim dan kelautan dalam transformasi ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya, RPJMN juga mendorong penciptaan lapangan kerja hijau, pelestarian hutan, ekonomi sirkular, serta pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim, yang bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sebagai persentase terhadap PDB melalui peningkatan ketahanan iklim. Dalam sektor energi, untuk mencapai kecukupan energi, strategi yang diusung mencakup peningkatan pasokan energi melalui energi baru dan terbarukan, perluasan akses dan layanan energi, serta penerapan transisi berkeadilan.

RPJMN juga menyatakan bahwa perlu adanya fokus pada pendalaman pasar modal melalui perluasan instrumen serta peningkatan jumlah investor, baik institusional maupun ritel, yang akan dilakukan melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan publik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi. RPJMN juga menekankan perlunya optimalisasi produk seperti obligasi/sukuk hijau, obligasi/sukuk biru, serta perdagangan karbon melalui infrastruktur pasar modal. Upaya-upaya ini untuk mendukung pertumbuhan investasi hijau yang akan dilaksanakan dengan tetap menjaga perlindungan konsumen dan investor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029

Prioritas 1

Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Prioritas 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Prioritas 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Prioritas 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Prioritas 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Prioritas 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Prioritas 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Prioritas 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mengimplementasikan seluruh inisiatif yang telah disebutkan di atas dan mencapai target NDCs, pemerintah Indonesia perlu memobilisasi pembiayaan yang luas untuk mendukung upaya dekarbonisasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka aliran modal dari berbagai sumber, termasuk dari sektor swasta. Sehubungan dengan pencapaian target *second* NDC, diestimasikan memerlukan total investasi sebesar USD472.6 miliar untuk mendanai program penurunan gas rumah kaca pada sektor energi, pertanian, FOLU, dan limbah.¹ Merespon kebutuhan pendanaan untuk pencapaian NDC tersebut, instrumen pasar modal dapat menyediakan berbagai opsi pendanaan untuk proyek atau kegiatan yang terkait dengan keberlanjutan, serta membantu memenuhi kebutuhan investasi tersebut melalui penerbitan instrumen keuangan hijau dan berkelanjutan, seperti obligasi tematik, *blended finance*, dan produk ekuitas berfokus ESG, sekaligus menarik investor yang berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan

Sebagai panduan bagi OJK dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan, OJK menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I 2015–2019 dan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021–2025. *Roadmap* Tahap I berfokus pada tiga kegiatan strategis utama, yaitu meningkatkan *supply* pendanaan ramah lingkungan hidup, meningkatkan *demand* bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup, serta meningkatkan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.

Untuk mempercepat transisi sektor keuangan menuju berkelanjutan, *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II diterbitkan dengan fokus pada integrasi tujuh komponen utama ekosistem keuangan berkelanjutan. Komponen-komponen tersebut meliputi kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi antar kementerian/lembaga, dukungan non-pemerintah, sumber daya manusia, dan kesadaran publik. Komponen-komponen ini dijabarkan menjadi program-program pengembangan yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh OJK bekerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I 2015 - 2019



Pengembangan Jangka Menengah

- Kerangka pengaturan
- Sistem pelaporan
- Peningkatan kapasitas
- Insentif
- Koordinasi



Pengembangan Jangka Panjang

- Manajemen risiko
- Tata Kelola
- Pemeringkatan bank
- Sistem Informasi keuangan berkelanjutan

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021 - 2025



Kebijakan



Dukungan Non-pemerintah



Produk



Infrastruktur Pasar



Sumber daya manusia



Koordinasi



Kesadaran publik

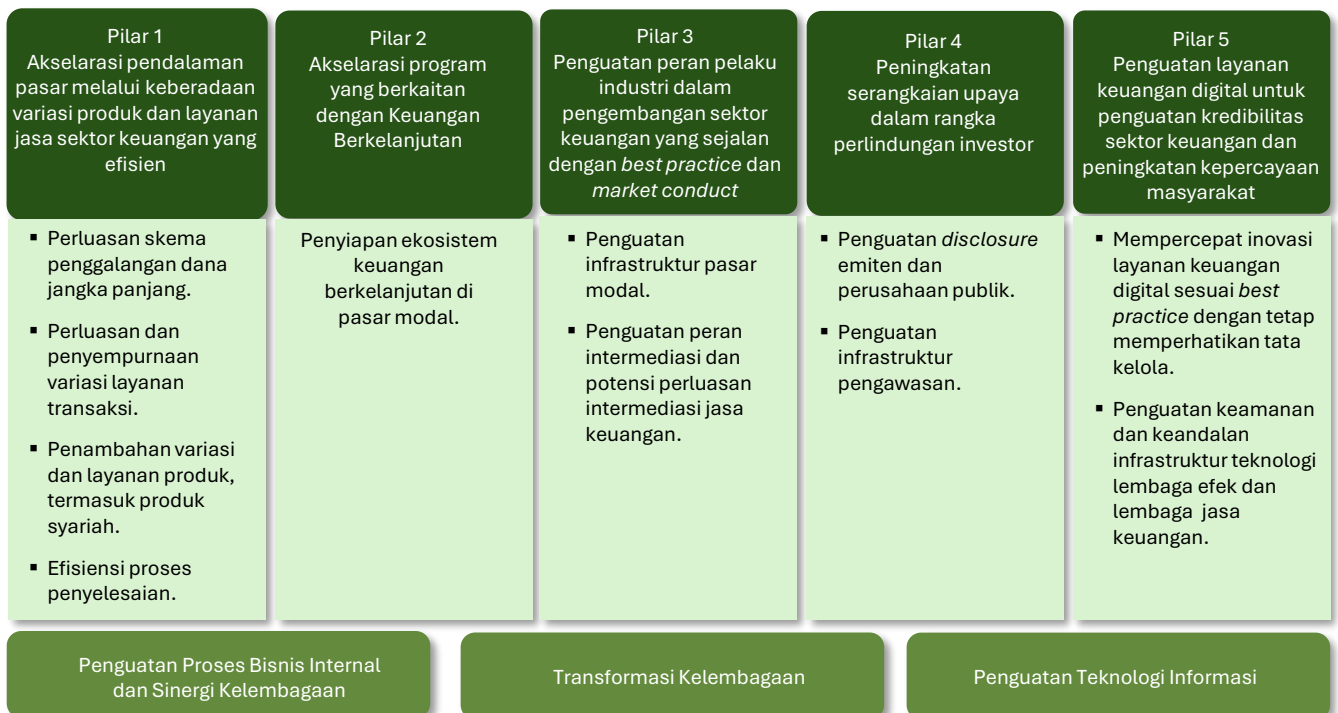
¹ Second Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, Ministry of National Development Planning, 2025.

Roadmap Pasar Modal Indonesia



Di sektor pasar modal, OJK menerbitkan *Roadmap* Pasar Modal Indonesia 2023–2027 sebagai panduan bagi OJK dan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan pasar modal, termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan. Salah satu pilar dalam *Roadmap* ini berfokus pada percepatan program-program terkait keuangan berkelanjutan. Pilar ini berfokus pada persiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal melalui pemberian asistensi penyediaan *local verifier* untuk *green bond*, pengembangan perdagangan karbon, pengembangan instrumen syariah berbasis ESG, serta produk investasi berbasis ESG. Pelaksanaan program-program pengembangan tersebut, beserta program-program yang terdapat dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I dan Tahap II, telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pelaku pasar modal berkelanjutan yang progresif di antara negara-negara berkembang di Kawasan Asia. Perkembangan regulasi dan praktik pasar modal berkelanjutan global menunjukkan perlunya ekosistem pasar modal berkelanjutan yang menyeluruh dan mendorong perluasan program keuangan berkelanjutan di pasar modal.

Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023 - 2027



Selain rencana pembangunan nasional dan *roadmap* tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga memberikan mandat untuk mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di industri jasa keuangan. Hal ini mencakup pengembangan regulasi, pengawasan, serta pengembangan produk keuangan berkelanjutan.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas serta perkembangan regulasi dan praktik pasar modal berkelanjutan global, mengarahkan pada kesimpulan bahwa diperlukan ekosistem pasar modal berkelanjutan yang menyeluruh dan mendorong perluasan program keuangan berkelanjutan di pasar modal. Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK berkomitmen untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai target NDCs dan mewujudkan rencana pembangunan nasional dengan mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di pasar modal. OJK juga berupaya menyediakan solusi *innovative financing* untuk memperkuat pendanaan dan instrumen investasi yang mendukung pengembangan keberlanjutan. Komitmen dan upaya tersebut selanjutnya dituangkan dalam *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan 2026 – 2030. *Roadmap* ini memuat prioritas dan rencana aksi sebagai panduan strategis bagi OJK dan pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan, regulasi, melakukan pengawasan, pengembangan produk dan infrastruktur, serta kegiatan pendukung lainnya dalam rangka membangun ekosistem pasar modal berkelanjutan.



METODOLOGI

Penyusunan *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan 2026 – 2030 dilakukan dengan proses yang terstruktur dan inklusif, yang dirancang untuk memastikan relevansi serta keselarasan dengan praktik terbaik internasional serta ekspektasi pasar. Proses penyusunan *Roadmap* ini dikembangkan berdasarkan tiga kegiatan, yaitu:

1. **Benchmarking** terhadap yurisdiksi lain seperti ASEAN, Uni Eropa, UAE, dan Australia, baik dilakukan secara online maupun kunjungan langsung. Kegiatan *benchmarking* ini dilakukan untuk mengidentifikasi regulasi-regulasi di berbagai yurisdiksi dan mengategorikan langkah-langkah penting dalam beberapa topik yang selanjutnya digunakan untuk menyusun pilar strategis dari *roadmap* ini.
2. **Gap Analysis** terhadap praktik atau pedoman serupa di nasional dan internasional yang bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam hal praktik, rencana aksi, dan insentif, sebagai dasar untuk menentukan prioritas yang memerlukan penguatan kelembagaan guna mendukung pengembangan pasar modal berkelanjutan di Indonesia. Dari aktivitas *benchmarking* dan *gap analysis* tersebut disusun rancangan struktur *roadmap* (*roadmap grand design*) yang terdiri dari pilar, prioritas, dan rencana aksi.
3. **Focus group discussions** antara OJK dan pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran, tujuan, dan potensi hambatan, serta mendapatkan pandangan dan masukan, sehingga meningkatkan relevansi *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan 2026-2030. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Kementerian dan Lembaga terkait, SROs, asosiasi pasar modal, dan pelaku pasar modal lainnya.

Dengan metodologi tersebut *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan 2026 - 2030 menjadi strategis, dapat ditindaklanjuti (*actionable*) dan inklusif, sehingga mendorong perkembangan pasar modal berkelanjutan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan iklim Indonesia. Ketiga kegiatan tersebut menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan 2026 - 2030. Gagasan-gagasan yang dihasilkan telah memberikan arah bagi keberlanjutan pasar modal Indonesia dalam lima tahun kedepan. Dengan demikian, pasar modal Indonesia dapat selaras dengan perkembangan global dan menjadi inspirasi bagi *emerging markets*.



Benchmarking

Menelaah *roadmap* di berbagai regional (ASEAN, Australia, Eropa, and Uni Emirat Arab), dan meninjau pasar modal Luxembourg



Gap Analysis

Membandingkan kondisi Indonesia saat ini (capaian dan yang sedang dilakukan) dengan praktik internasional dan harapan pasar



Focus Group Discussion

Mengumpulkan masukan dan berbagai *stakeholders* (Kementerian/Lembaga, bank sentral, pelaku pasar, SROs, profesi, dan lainnya)



Roadmap Grand Design

Menyusun struktur *roadmap* yang mencakup pilar, prioritas, rencana aksi, dan *enabler*



Diskusi Mendalam

Pembahasan *grand design roadmap* dengan *stakeholders*.



Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan



TUJUAN PENYUSUNAN ROADMAP

1 Untuk membangun ekosistem pasar modal berkelanjutan

Roadmap ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai ekosistem pasar modal berkelanjutan yang akan dibangun oleh OJK bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.



2 Menunjukkan komitmen OJK

Roadmap ini menggambarkan seberapa kuat komitmen OJK dalam mengembangkan pasar modal berkelanjutan yang selaras dengan perkembangan internasional.

3 Menjadi referensi dan panduan

Roadmap ini memberikan panduan dan acuan bagi OJK serta para pemangku kepentingan dalam mengambil langkah-langkah pengembangan pasar modal berkelanjutan.

4 Mengakomodir kepentingan dan ekspektasi para pemangku kepentingan

Roadmap ini menjelaskan bagaimana *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan mengakomodir kepentingan dan ekspektasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan pasar modal berkelanjutan.

5 Membangun kolaborasi dan partisipasi pemangku kepentingan

Roadmap ini mengajak partisipasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan prioritas yang tercakup dalam *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan.

BAB 2

GAMBARAN PASAR MODAL BERKELANJUTAN



PERKEMBANGAN PASAR MODAL BERKELANJUTAN INTERNASIONAL

Sepanjang satu dekade terakhir, keuangan berkelanjutan telah berkembang dari hal yang kecil menjadi bagian penting di pasar modal global. Perkembangan kerangka regulasi dan kebijakan yang mengkomodir prinsip keberlanjutan, meningkatnya kebutuhan investor, serta inovasi pasar telah mengubah tujuan bisnis, yaitu tidak hanya mempertimbangkan keuntungan namun juga mempertimbangkan bagaimana bisnis berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Perubahan ini mendorong penciptaan serta penetapan standar baru untuk transparansi, manajemen risiko, dan keberlanjutan.

Perkembangan Taksonomi

“Dengan memperjelas makna “berkelanjutan”, kehadiran taksonomi dapat mengurangi risiko greenwashing serta memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan investor.”

Pemerintah dan otoritas keuangan di berbagai negara telah menyusun taksonomi hijau dan sosial sebagai sistem klasifikasi investasi dan kegiatan berkelanjutan. Beberapa taksonomi yang merepresentasikan kawasan regional antara lain: *EU Taxonomy for Sustainable Activities* yang berlaku sejak 2018; *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* Versi 1, 2, dan 3 yang masing-masing diterbitkan pada 2021, 2023, dan 2024; serta pada tahun 2025 diterbitkannya *China’s Green Finance Taxonomy* versi revisi dan *Australian Sustainable Finance Taxonomy*.

Dengan memperjelas makna “berkelanjutan”, kehadiran taksonomi dapat mengurangi risiko *greenwashing* serta memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan investor. Kolaborasi internasional dalam hal ini juga semakin meningkat, yang dibuktikan dengan adanya *EU-China-Singapore Multi-Jurisdiction Common Ground Taxonomy* yang bertujuan menyelaraskan interoperabilitas standar dan meningkatkan arus modal lintas batas (*cross border*). Kegiatan *capacity building* internasional juga telah dilakukan untuk mendukung otoritas dan tim teknis di berbagai negara dalam merancang dan menyempurnakan taksonomi, serta mengintegrasikannya ke dalam ekosistem kebijakan domestik.

Ketentuan Pelaporan dan Pengungkapan ESG

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, 2017) dan *International Sustainability Standards Board’s* (ISSB) *International Financial Reporting Standards* (IFRS S1 & S2, 2023) telah menjadi dasar pelaporan keuangan terkait iklim dan keberlanjutan. TCFD *recommendations* memperkenalkan pelaporan risiko iklim yang berlandaskan pada tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target, sementara IFRS S1 & S2 merupakan suatu kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif dan selaras dengan standar pelaporan keuangan.

Berbagai regulator saat ini telah mewajibkan penerapan pengungkapan ESG, antara lain melalui *EU’s Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR), *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD),

serta aturan pengungkapan risiko iklim dari *the United States Securities and Exchange Commission* (U.S. SEC). Regulasi dan panduan tersebut selain mengatur mengenai transparansi, juga memasukkan ESG ke dalam tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan proses pengambilan keputusan. Bank dan perusahaan asuransi juga diharapkan mengintegrasikan faktor iklim dan ESG ke dalam pengendalian risiko perusahaan. Selain itu, direksi juga secara eksplisit bertanggung jawab atas pengawasan pengungkapan keberlanjutan. Pada akhirnya, hal-hal tersebut akan menciptakan dorongan global menuju pelaporan ESG yang konsisten dan berkualitas tinggi, yang membantu investor dalam menilai suatu perusahaan dan prospek kelangsungan usaha jangka panjang.

Pertumbuhan Obligasi Hijau dan Pendanaan Berkelanjutan

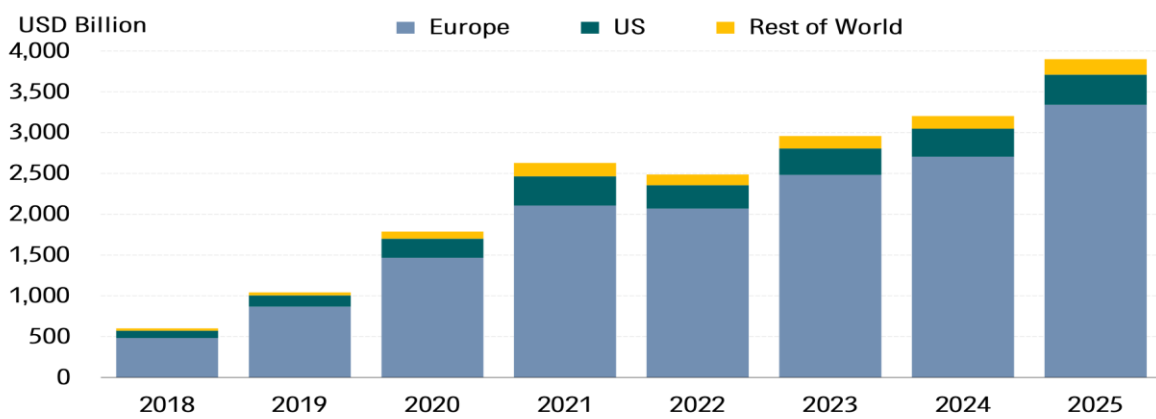
Pertumbuhan pendanaan berkelanjutan dan obligasi hijau telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2020 hingga kuartal tiga tahun 2025, total kumulatif obligasi hijau, sosial, keberlanjutan, terkait keberlanjutan, dan transisi melebihi USD 6 triliun, angka tersebut naik dari hanya USD 2 miliar di lima belas tahun sebelumnya.² Pada 2016, obligasi hijau negara (*green sovereign bond*) pertama diterbitkan oleh Polandia. Sementara itu, pada tahun 2018 sukuk hijau negara (*sovereign green sukuk*) pertama diterbitkan oleh Indonesia, yang kemudian hingga tahun 2025 sudah banyak negara yang juga turut menerbitkan obligasi hijau atau sukuk. Perkembangan ini menegaskan bahwa produk pendanaan hijau, sosial, keberlanjutan, terkait keberlanjutan, dan transisi kini telah menjadi bagian penting dari pasar pembiayaan global.



Sumber data: *Climate Bonds Initiative Sustainable Debt Global State of the Market Q3 2025* ([Link](#))

Secara regional, Eropa memegang pangsa terbesar dalam penerbitan instrumen utang berkelanjutan global, dimana pertumbuhannya kini terus menyebar ke berbagai kawasan. Penerbitan obligasi berkelanjutan di Amerika Serikat tumbuh sekitar 60% pada 2024.³ Selain itu, di ASEAN, penerbitan obligasi yang selaras dengan *ASEAN Bond Standards* mencapai USD 50 miliar pada akhir 2024⁴. Selanjutnya, Arab Saudi menerbitkan sukuk hijau bernilai miliaran dolar kepada investor global melalui *Public Investment Fund*.

Nilai Asset Reksa Dana Berkelanjutan Global (Miliar Dolar Amerika)



Sumber data: Morningstar ([Link](#))

² [Climate Bonds | Global sustainable debt volume aligned with Climate...](#)

³ [Sustainable Bond Analysis 2024](#)

⁴ [Accelerating Green Bonds for Municipalities in Southeast Asia](#)

Di ASEAN, penerbitan tahunan instrumen berkelanjutan telah mengalami percepatan sejak tahun 2017 – mencapai angka kisaran USD16 miliar pada tahun 2025 – dimana *sustainability bonds* menyumbang lebih lebih dari dua pertiga volume obligasi tematik ASEAN sepanjang 2017-2025, diikuti oleh tema *green* dan *sustainability-linked*. Di sisi lain, reksa dana berbasis ESG (*ESG-focused investment funds*) berkembang pesat, dengan total *Assets under Management* (AuM) mencapai lebih dari USD 3,9 triliun pada 2025, dan *exchange traded funds* (ETF) berbasis ESG mencatat rekor USD 645 miliar pada 2024⁵. Perkembangan ini didukung oleh berbagai program bantuan teknis dan pelatihan yang membantu pelaku pasar untuk merancang, mengevaluasi, dan menerbitkan instrumen berkelanjutan.



Sumber data: ACMF ([Link](#))

Perkembangan Pasar Karbon



Dalam rangka mengkapitalisasi biaya yang timbul dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, dilakukan pengukuran nilai ekonomi untuk setiap ton emisi gas rumah kaca yang dikenal dengan istilah Nilai Ekonomi Karbon (*Carbon Pricing*). Di pasar karbon global, skema perdagangan karbon terus mengalami pertumbuhan. Sebagai contoh, *China's National Emission Trading System* (China ETS) yang telah mencapai volume perdagangan 5 miliar tCO₂ sejak 2021. Sementara itu, *European Union Emission Trading System* (EU ETS) juga telah memperluas cakupannya ke sektor maritim dan transportasi darat sejak 2024, bersamaan dengan pemberlakuan *Carbon Border Adjustment Mechanism* di awal tahun 2026. Di sisi lain, yurisdiksi lain seperti Kanada, Korea Selatan, dan ASEAN juga telah memperkuat kebijakan *mandatory carbon pricing*.

⁵ [ETFGI reports assets invested in ESG ETFs listed globally reached a new record of 645.21 billion US dollars at the end of November | ETFGI LLP](#)

Slain itu, seiring dengan pertumbuhan pasar karbon sukarela (*voluntary carbon market*) yang diproyeksikan akan melampaui USD 50 miliar pada 2030, pasar tersebut menawarkan suatu alternatif untuk membiayai dekarbonisasi dan melakukan *offset* terhadap emisi residual. Untuk mendukung hal tersebut, berbagai inisiatif dalam meningkatkan kualitas dan transparansi kredit karbon tengah dilakukan guna membangun kepercayaan terhadap pasar karbon sukarela (*voluntary carbon market*)⁶.

Meningkatnya Permintaan Investor dan Tekanan Pasar

Permintaan dan penawaran atas produk dan jasa berkelanjutan meningkat seiring berjalannya waktu. Peningkatan ini tercipta karena bertumbuhnya kesadaran publik atas nilai-nilai keberlanjutan. Dari sisi penawaran, perusahaan melakukan transisi dari *business as usual* menjadi bisnis yang berkelanjutan untuk berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca demi tercapainya *net-zero target*. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengintegrasikan nilai ESG dalam aktivitas bisnis dan menerbitkan produk pendanaan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memberikan dampak pada lingkungan dan sosial. Transisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran perusahaan serta permintaan para pemangku kepentingan, investor, dan kreditor. Dengan demikian, untuk memfasilitasi sisi penawaran dalam bertransisi menuju ekonomi berkelanjutan diperlukan standar dan kebijakan serta inovasi produk berkelanjutan.

Dari sisi permintaan, investor institusi seperti bank dan perusahaan asuransi telah menyusun komitmen bersama untuk mencapai *net-zero portfolio* (seperti *The Glasgow Financial Alliance for Net Zero*, *The Net Zero Banking Alliance*, dan *UN-Convened Net-Zero Asset Owner Alliance*). Sejalan dengan hal tersebut, produk investasi ESG (*ESG Funds*) juga menunjukkan daya tarik yang kuat dengan total aset mencapai USD 3,9 triliun di kuartal tiga 2025, meskipun adanya kritik terhadap ESG dan ketidakpastian geopolitik yang meningkat.⁷ Pemenuhan sisi permintaan ini mendorong pembuat kebijakan untuk melakukan penguatan regulasi serta mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik keberlanjutan guna mendapatkan akses terhadap modal.

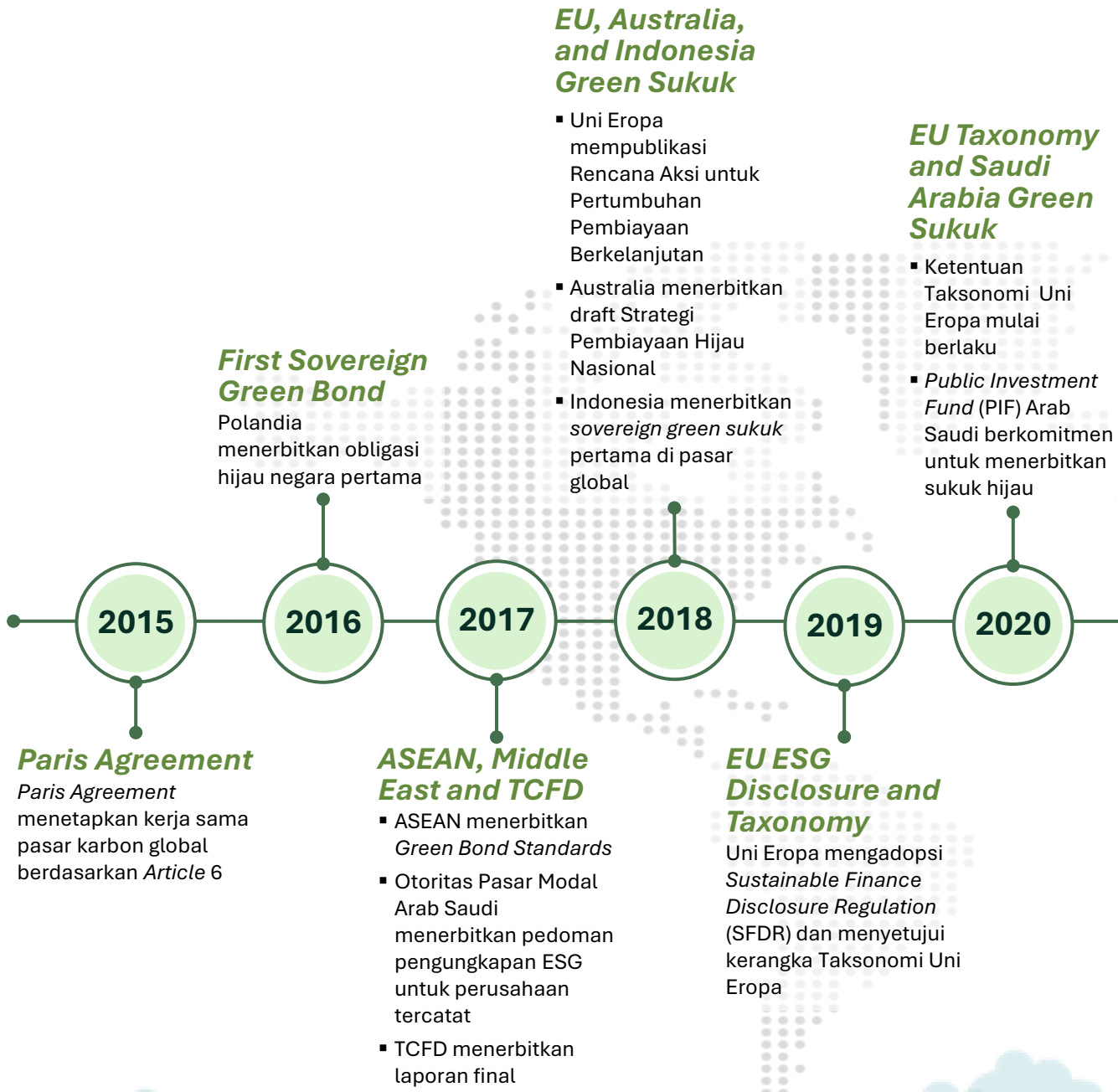


⁶ <https://icvcm.org/>

⁷ [Global Sustainable Fund Flows: Why the Worst Outflows Since 2018 Aren't the Full Story | Morningstar](#)

Lini Waktu

Perkembangan Pasar Modal Berkelanjutan Internasional



CSRD, Green Sukuk, SDG Bonds and SRFS

- Uni Eropa mengadopsi CSRD dan meluncurkan program percontohan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM)
- Arab Saudi menerbitkan *green sukuk* senilai USD3 miliar
- Indonesia menerbitkan *SDG bond*
- ASEAN menerbitkan the *ASEAN Sustainable and Responsible Fund Standards* (SRFS)

EU ETS, ASEAN Taxonomy and VCM

- Uni Eropa mengesahkan ETS2 untuk bangunan dan transportasi
- ASEAN merilis Taksonomi Versi 3, memperkenalkan kriteria “*Do No Significant Harm*”
- ASEAN menerbitkan kajian *High-Quality Voluntary Carbon Market*

2021

China ETS & ASEAN Taxonomy

- Tiongkok menerbitkan ETS nasional
- ASEAN menerbitkan Taksonomi versi 1

2022

Massive Global Development

- ISSB menerbitkan IFRS S1 & S2; beberapa negara G20 mulai mengadopsi standar tersebut
- ASEAN merilis Taksonomi Versi 2, memperluas kriteria sektoral
- Uni Eropa memperluas ETS ke sektor pengiriman maritim
- Australia menguji draf taksonomi nasional bersama bank-bank percontohan
- *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) mengesahkan standar prototipe ISSB
- ASEAN merilis *ASEAN Transition Finance Guidance*

2023

2024

2025

EU and Australia

- Perusahaan-perusahaan di Uni Eropa menerbitkan laporan pertama yang sesuai dengan CSRD
- Pemerintah Australia secara resmi meninjau taksonomi untuk implementasi



PERKEMBANGAN PASAR MODAL BERKELANJUTAN INDONESIA

“Berdasarkan report yang diterbitkan oleh Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) tahun 2023, Indonesia telah dikategorikan sebagai maturing country dalam hal penerapan keuangan berkelanjutan.”

Berdasarkan *report* yang diterbitkan oleh *Sustainable Banking and Finance Network* (SBFN) tahun 2023, Indonesia telah dikategorikan sebagai *maturing country* dalam hal penerapan keuangan berkelanjutan⁸. Penilaian tersebut didasarkan pada berbagai inisiatif dan pencapaian keuangan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh otoritas dan regulator di sektor keuangan yaitu OJK, Kementerian/Lembaga terkait serta para pemangku kepentingan.

Otoritas dan regulator di sektor keuangan beserta pemangku kepentingan telah memperkuat komitmen untuk penerapan keuangan berkelanjutan sejak diratifikasinya *Paris Agreement* oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016. Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi tersebut, OJK telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas lembaga jasa keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik dalam mengimplementasikan prinsip ESG serta beradaptasi terhadap perubahan iklim

menuju ekonomi rendah karbon, OJK menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I 2015–2019. Melanjutkan keberhasilan *roadmap* tahap pertama tersebut, OJK meluncurkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021–2025 guna mempercepat transisi sektor jasa keuangan menuju keberlanjutan dengan memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan.

Sebagai implementasi *roadmap* tersebut, pada tahun 2022 OJK memperkenalkan Taksonomi Hijau yang merupakan klasifikasi sektor dan sub-sektor aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Taksonomi tersebut bertujuan untuk mencegah *greenwashing* pada sektor jasa keuangan. Klasifikasi kriteria pada Taksonomi Hijau dibagi menjadi tiga kategori yaitu: hijau (*do no significant harm, apply minimum safeguard, provide positive Impact to the environment and align with the environmental objective of the Taxonomy*), kuning (*do no significant harm*), dan merah (*harmful activities*).

⁸ <https://data.sbfnetwork.org/country/indonesia>



Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian komitmen Pemerintah Indonesia, OJK mengembangkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. TKBI tersebut sejalan dengan *Nationally Determined Contribution* (NDCs) Indonesia. TKBI mencakup sektor yang lebih luas, seperti energi, limbah, proses industrial dan penggunaan produk (*Industrial Processes and Product Use – IPPU*), agrikultura, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (*Agriculture, Forestry, and Other Land Uses - AFOLU*).

Berbeda dengan Taksonomi Hijau, TKBI mengklasifikasikan aktivitas bisnis menjadi “Hijau” atau “Transisi” namun apabila tidak memenuhi kedua persyaratan tersebut maka dinilai “Tidak Memenuhi Klasifikasi”.

Klasifikasi hijau berarti bahwa aktivitas perusahaan sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1.5°C yang sejalan dengan *Paris Agreement* termasuk mempertimbangkan NZE Indonesia tahun 2060 (atau lebih awal) dan memenuhi aspek sosial. Adapun klasifikasi transisi ditujukan bagi aktivitas yang saat ini belum sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global, belum berada pada jalur NZE, namun bergerak menuju klasifikasi hijau, memfasilitasi pengurangan emisi yang signifikan, mendorong aktivitas berkelanjutan, serta memenuhi aspek sosial.

Selanjutnya, selain *roadmap* dan taksonomi tersebut, OJK juga telah melakukan berbagai inisiatif terkait dengan regulasi, kebijakan, infrastruktur pendukung, pengembangan produk, dan lainnya.

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Prinsip	Cakupan
<ul style="list-style-type: none"> Scientific and credible Interoperable dan mendukung kepentingan nasional Inklusif 	<ul style="list-style-type: none"> Energi Limbah Agrikultura Industrial Processes and Product Use (IPPU) Forestry, and Other Land Uses (FOLU)
Tujuan Lingkungan (<i>Environmental Objectives - EO</i>)	Kriteria Esensial (<i>Essential Criteria - EC</i>)
<ul style="list-style-type: none"> EO1: Mitigasi perubahan iklim EO2: Adaptasi perubahan iklim EO3: Perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati EO4: Ketahanan sumber daya dan transisi menuju ekonomi sirkular 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menyebabkan kerusakan signifikan (DNSH) Upaya perbaikan (RMT) Aspek sosial
Klasifikasi TKBI	
<p> Aktivitas yang memenuhi kriteria “Hijau” pada salah satu EO dan seluruh EC, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak menyebabkan kerusakan/kerugian (DNSH) bagi EO lainnya. Jika menyebabkan kerusakan/kerugian maka melakukan perbaikan (RMT) dan telah memastikan bahwa tidak menyebabkan kerusakan/kerugian bagi EO lainnya; dan Memenuhi seluruh aspek sosial. 	<p> Aktivitas yang memenuhi kriteria “Transisi” pada salah satu EO dan memenuhi sebagian dari EC, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih menyebabkan kerusakan/kerugian (DNSH) bagi EO lainnya meskipun telah melakukan perbaikan (RMT); dan Memiliki rencana perbaikan ke depan; dan Memenuhi seluruh aspek sosial.

Regulasi, Kebijakan dan Infrastruktur Pendukung Penerapan Prinsip Keberlanjutan



Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK 51)

Dalam POJK 51, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik didorong untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, antara lain prinsip investasi bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan, prinsip tata kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusivitas, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas, serta prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Berdasarkan POJK 51, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan untuk menyusun laporan keberlanjutan dan menyampaikannya kepada OJK serta mengungkapkan laporan kepada publik. Laporan keberlanjutan harus mencakup informasi mengenai strategi keberlanjutan perusahaan; aspek keberlanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; tata kelola keberlanjutan; kinerja keberlanjutan; serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Persyaratan pengungkapan ini selaras dengan standar internasional.

Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (SEOJK 16)

Setelah diterbitkannya POJK 51, pada tahun 2021 OJK mengeluarkan surat edaran sebagai panduan penyusunan laporan keberlanjutan bagi emiten dan perusahaan publik. Surat edaran ini menjelaskan isi dan informasi yang harus dimasukkan dalam laporan tahunan serta laporan keberlanjutan. Laporan tersebut harus memuat informasi seperti kinerja keuangan, profil perusahaan, tata kelola perusahaan, dan informasi terkait ESG yang juga mencakup informasi emisi GRK. Mengingat kecenderungan investor menggunakan informasi keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan berkembang pesat, SEOJK 16 juga mempertimbangkan praktik dan standar internasional dengan tujuan informasi keberlanjutan dapat dibandingkan secara global.

Adopsi IFRS S1 dan S2

Pada tahun 2023, *International Sustainability Standards Board* (ISSB) memperkenalkan 2 (dua) standar terkait pengungkapan informasi keberlanjutan, yaitu IFRS S1 yang berfokus pada persyaratan umum untuk pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan, dan IFRS S2 yang berfokus pada pengungkapan terkait iklim. Standar-standar ini berperan sebagai standar universal yang dapat digunakan secara global. Oleh karena itu, standar ini akan memastikan *interoperability* di seluruh dunia, yang sangat penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi.

Sebagai respon terhadap standar yang baru diterbitkan ini dan untuk menyesuaikan dengan praktik internasional, Indonesia melalui Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) telah menyelesaikan proses adopsi terhadap standar-standar tersebut. Sebagai bagian dari anggota dewan dan sebagai regulator di sektor jasa keuangan, OJK saat ini sedang melakukan persiapan penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 melalui penyempurnaan POJK 51 sebagai regulasi pedoman yang berlaku bagi pelaku usaha jasa keuangan.

Climate Risk Management & Scenario Analysis

Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) adalah kerangka kerja terintegrasi yang mencakup aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model dan strategi bisnis bank dalam menghadapi perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. CRMS diterbitkan pada tahun 2024 yang bertujuan untuk mendukung penerapan keberlanjutan di sektor perbankan, termasuk bagi bank yang menjadi emiten di pasar modal. CRMS membantu bank dalam menilai dampak perubahan iklim terhadap kinerja dan keberlanjutan bisnis.

Sistem Pelaporan ESG Emiten dan Perusahaan Publik

Untuk mendorong perusahaan tercatat menerapkan prinsip ESG dan meningkatkan tata kelola serta transparansi data ESG, Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan platform pelaporan ESG pada Januari 2025. Platform ini terintegrasi dengan Sistem Pelaporan Elektronik untuk Perusahaan Tercatat (SPE-IDX) melalui formulir E020 yang terkait dengan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. Dalam formulir ini, penerbit diwajibkan mengungkapkan informasi mengenai kinerja ESG, termasuk emisi GRK *scope* 1, 2, dan 3. Untuk memudahkan penyampaian laporan pada platform tersebut, BEI menerbitkan panduan pelaporan ESG yang bertujuan untuk menjelaskan konsep ESG dalam bisnis perusahaan tercatat. Panduan ini juga menjelaskan informasi yang perlu dilaporkan dalam pelaporan ESG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

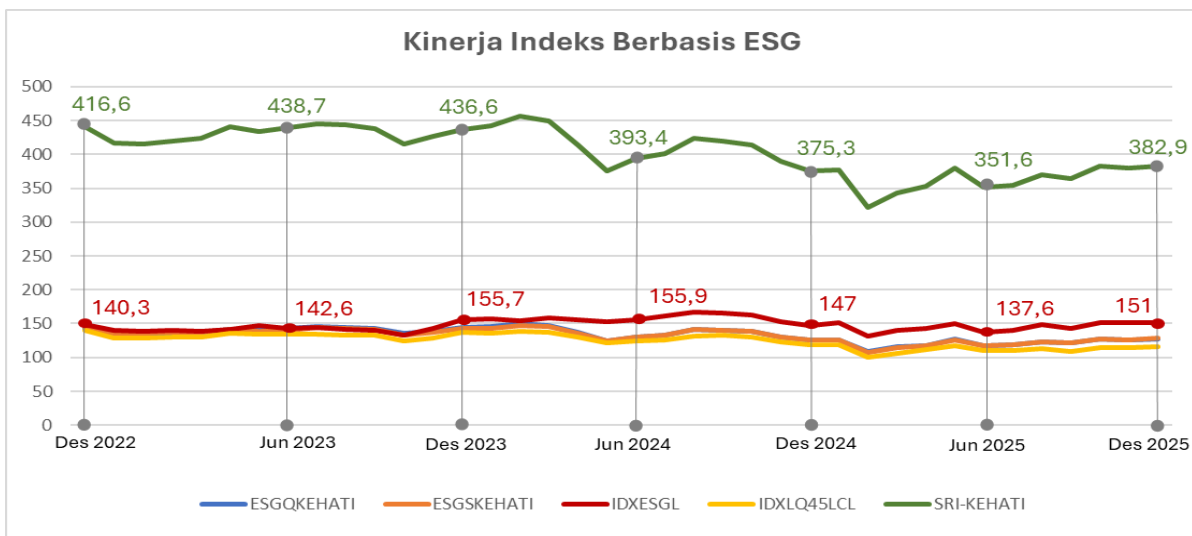


Perkembangan Produk Keberlanjutan

Indeks Saham Berbasis ESG

Indeks saham berbasis ESG bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan baik metrik keuangan maupun aspek ESG sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur bagi investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang mengintegrasikan keberlanjutan, sekaligus mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik ESG. Berikut beberapa indeks saham berbasis ESG yang telah diperkenalkan di pasar modal Indonesia.

SRI KEHATI	Diluncurkan pada 8 Juni 2009. Indeks ini berisikan 25 saham emiten yang memiliki kinerja baik dalam mendorong keberlanjutan dan kesadaran terhadap <i>sustainable and responsible investment</i> (SRI).
IDX ESG Leaders	Diluncurkan pada 14 Desember 2020. Indeks ini mengukur kinerja saham dengan penilaian ESG yang baik dan tidak terlibat pada kontroversi signifikan serta memiliki likuiditas dan kinerja keuangan yang baik.
ESG Sector Leaders IDX KEHATI	Diluncurkan pada 20 Desember 2021. Indeks ini menawarkan <i>exposure</i> pasar yang luas dan diversifikasi melalui pemilihan perwakilan saham dengan <i>ESG score</i> terbaik dari setiap sektor industri.
ESG Quality 45 IDX KEHATI	Diluncurkan pada 20 Desember 2021. Indeks yang berisikan 45 saham terbaik dalam penilaian kinerja ESG, kualitas keuangan perusahaan, serta likuiditas.
IDX LQ45 Low Carbon Leaders	Diluncurkan pada 11 November 2022. Indeks yang bertujuan untuk mengurangi eksposur intensitas emisi karbon atas portofolio sebesar minimal 50% dibandingkan dengan Indeks LQ45 sebagai <i>parent index</i> .



Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan Negara

Sebagai komitmen untuk mengatasi perubahan iklim, Kementerian Keuangan telah menerbitkan *Thematic Bond and Sukuk Framework* pada tahun 2018. Berdasarkan kerangka ini, melalui Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia menjadi pionir dalam menerbitkan sukuk hijau (*green sukuk*) negara pertama di pasar global. Sejak saat itu, penerbitan sukuk hijau negara terus meningkat, baik yang ditawarkan kepada pasar global maupun domestik. Di pasar domestik, sukuk hijau diterbitkan secara *wholesale* maupun retail. Akumulasi penerbitan sukuk hijau negara hingga akhir 2025 ke pasar global mencapai sekitar USD 7,7 miliar dan penerbitan di pasar domestik mencapai Rp 85,97 triliun.

Hasil penerbitan sukuk hijau ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, ketahanan terhadap perubahan iklim, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, bangunan hijau, serta pengelolaan air dan limbah berkelanjutan. Alokasi ini menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan lainnya. Berdasarkan *Green Sukuk Allocation and Impact Report 2025*, akumulasi alokasi hasil penerbitan dari tahun 2018 hingga 2024 didominasi oleh sektor pengelolaan air dan limbah air berkelanjutan yang mencapai 43,25%, ketahanan terhadap perubahan iklim/pengurangan risiko bencana mencapai 25,96%, dan transportasi berkelanjutan sebesar 21,61%. Untuk proyek ketahanan iklim seperti pengelolaan banjir dan kekeringan, serta infrastruktur pertanian berdampak pada penurunan jumlah area rawan banjir, peningkatan layanan air baku dan kapasitas penyimpanan air. Sementara itu, untuk proyek transportasi berkelanjutan berdampak pada penurunan emisi GRK, sebagai contoh proyek pengembangan infrastruktur konektivitas KRL di DKI Jakarta diperkirakan berkontribusi pada penurunan sebesar 510.063,8 tons of CO₂e.

Lebih lanjut, pemerintah juga telah menerbitkan obligasi SDGs dan obligasi biru (*blue bonds*). Akumulasi penerbitan obligasi SDGs 2021-2025 mencapai EUR1,85 miliar yang diterbitkan di pasar global dan Rp16,85 triliun yang diterbitkan di pasar domestik dari tahun 2022 hingga 2024. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan *blue bond* dengan nilai akumulasi 2023-2025 mencapai JPY49,4 miliar. *SDG Bond and Blue Bond Allocation and Impact Report 2024* menjelaskan bahwa hasil penerbitan obligasi SDGs dialokasikan untuk proyek ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja termasuk pembiayaan UMKM, serta akses layanan dasar. Sementara itu, hasil penerbitan *blue bond* dialokasikan untuk perlindungan laut dan wilayah pesisir, restorasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, pengelolaan sampah, serta manajemen bencana dan mitigasi risiko.



Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan Korporasi

Untuk mencapai target *net zero*, dukungan dari pembiayaan swasta sangat dibutuhkan. Pembiayaan ini dapat membantu pendanaan investasi ramah iklim. Guna mendorong jumlah pendanaan berkelanjutan yang lebih besar, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 18/2023 (POJK 18) tentang Persyaratan Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, yang menggantikan Peraturan sebelumnya Nomor 60/POJK.04/2017 (POJK 60) mengenai obligasi berwawasan lingkungan (*Green Bond*). Berdasarkan POJK 18, cakupan obligasi dan sukuk diperluas tidak hanya *green* namun juga mencakup instrumen dengan tema sosial, keberlanjutan, terkait keberlanjutan, dan sukuk wakaf. Ketentuan di dalam POJK 18/2023 telah sejalan dengan prinsip *International Capital Market Association* (ICMA), standar ASEAN, serta Fatwa mengenai Sukuk Wakaf yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI).

Untuk menarik lebih banyak pelaku pasar menerbitkan obligasi dan sukuk berlandaskan keberlanjutan, OJK memberikan insentif berupa potongan sebesar 75% pada biaya pendaftaran penerbitan *green bond*, yang nantinya akan diperluas untuk obligasi dan sukuk tematik lainnya. Selain itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memberikan insentif berupa potongan sebesar 50% atas biaya pencatatan obligasi dan sukuk berlandaskan keberlanjutan di bursa.

Penerbitan obligasi dan sukuk korporasi berlandaskan keberlanjutan berupa *green bond* pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Sejak saat itu, jumlah penerbitan terus meningkat. Dari tahun 2018 hingga akhir 2025, total akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan telah mencapai IDR 74,14 triliun atau sekitar USD 4,43 miliar, yang diterbitkan oleh 15 emiten melalui 39 penerbitan (85 seri). Hingga Desember 2025, obligasi dan sukuk berkelanjutan beredar mencapai IDR 54,94 triliun (USD 3,29 miliar) dalam 68 seri. Dari seluruh obligasi dan sukuk yang diterbitkan, tema *green* mendominasi sebesar 42,72%, disusul tema *social* sebesar 28,82%, *sustainability* sebesar 26,44%, dan *sustainability-linked* sebesar 2,02%.



INSENTIF

75%
off

Insentif untuk penerbitan *green bond* berupa potongan biaya pendaftaran ke OJK*

*OJK akan memperluas cakupan insentif pada obligasi dan sukuk berkelanjutan tema lainnya.

50%
off

Insentif biaya pencatatan Obligasi dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan di Bursa Efek Indonesia.



PENERBITAN

Per Desember 2025

74,14 ^{RP} Triliun

Nilai akumulasi penerbitan (USD4,43 miliar)

54,94 ^{RP} Triliun

Nilai Beredar (USD3,29 miliar)

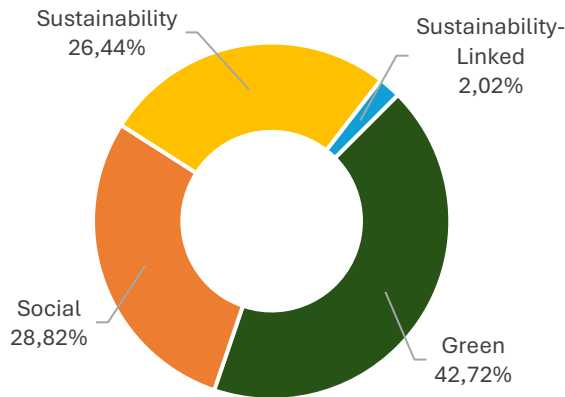
85 15 Emiten
39 Penerbitan

Akumulasi jumlah seri penerbitan

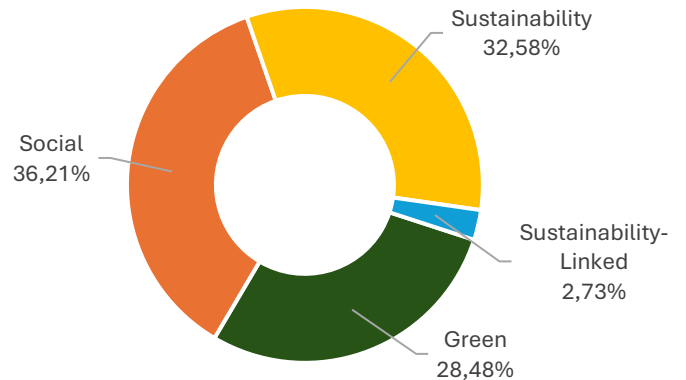
68 15 Emiten
25 Penerbitan

Jumlah Seri Beredar

Akumulasi Penerbitan Berdasarkan Label

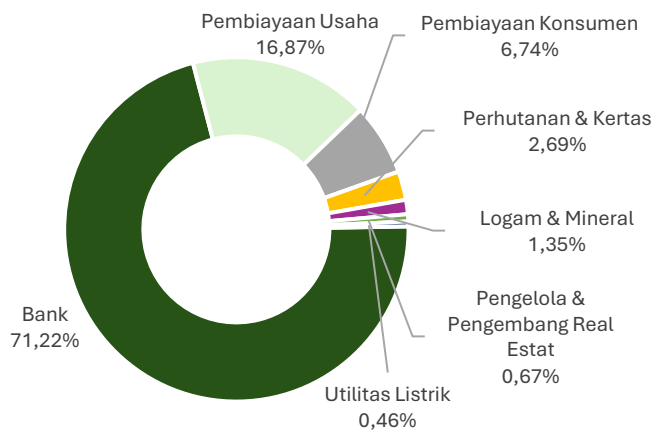


Nilai Beredar Berdasarkan Label

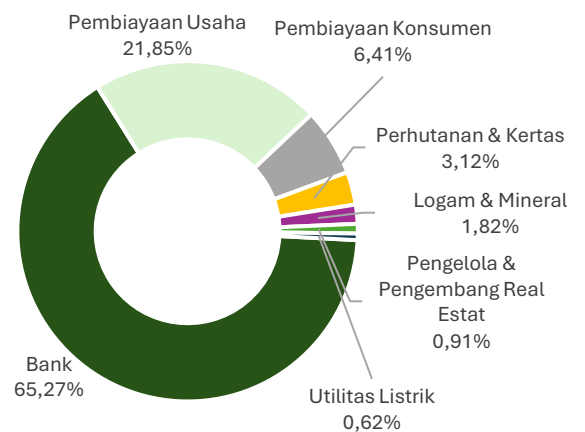


Berdasarkan nilai akumulasi, penerbitan obligasi dan sukuk berlandaskan keberlanjutan didominasi oleh tema hijau (*green*), namun berdasarkan nilai beredar, didominasi oleh tema *social*. Sementara tema *sustainability-linked* menduduki porsi terkecil.

Akumulasi Penerbitan Berdasarkan Industri

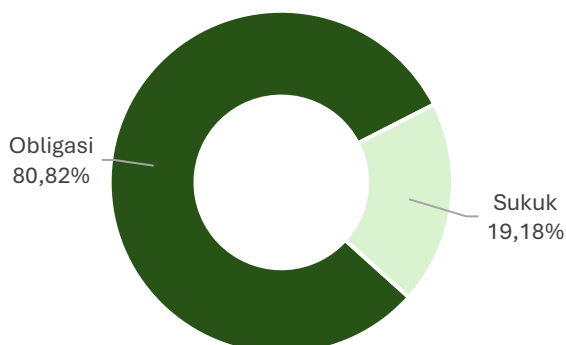


Nilai Beredar Berdasarkan Industri

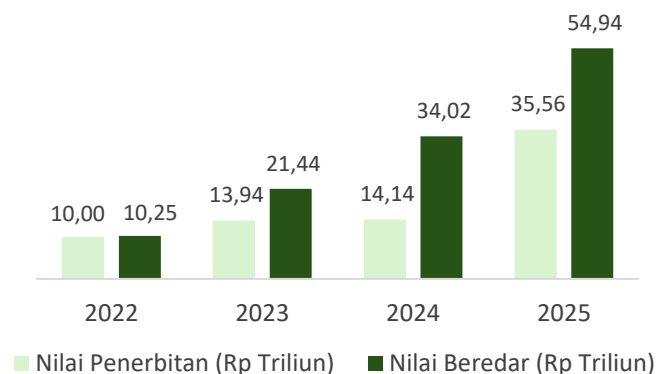


Penerbitan obligasi dan sukuk berlandaskan keberlanjutan didominasi oleh lembaga jasa keuangan dari sektor perbankan, diikuti sektor pembiayaan usaha dan pembiayaan konsumen. Penerbitan oleh emiten di sektor lainnya masih relatif kecil.

Akumulasi Penerbitan Berdasarkan Efek



Nilai Penerbitan dan Nilai Beredar

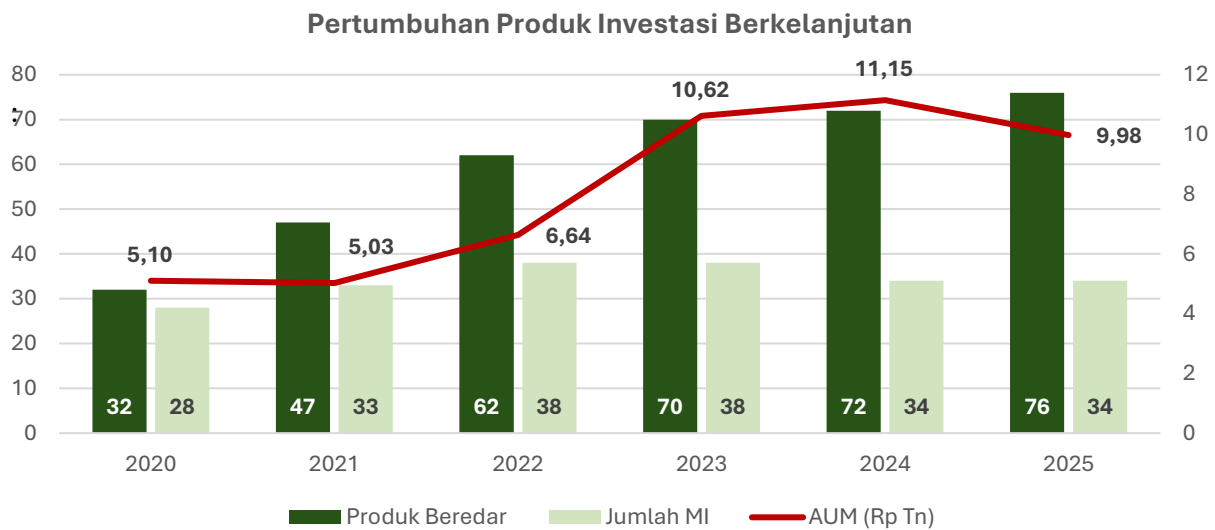


Sumber data: OJK

Investasi Berbasis Investasi

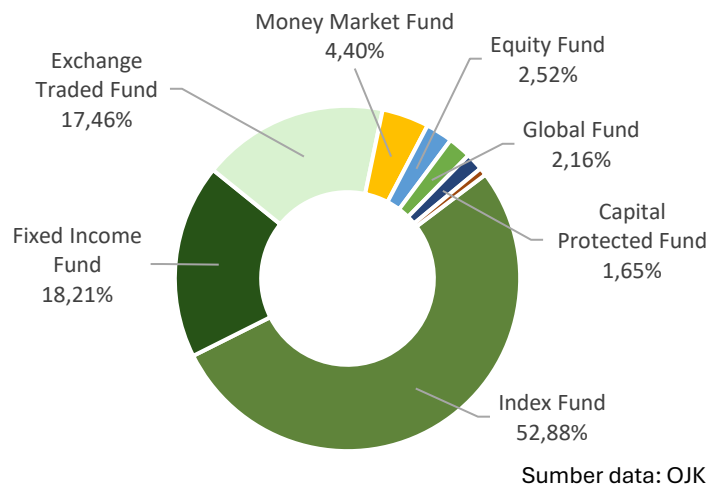
Untuk memenuhi permintaan investor terhadap instrumen investasi berkelanjutan, beberapa manajer investasi di Indonesia telah menawarkan reksa dana berbasis ESG. Sebagian reksa dana didasarkan pada indeks *ESG-based equity* yang tersedia di pasar saham dan sebagian lainnya dibentuk berdasarkan kerangka kebijakan reksa dana berkelanjutan (*sustainable fund framework*) yang disusun oleh masing-masing manajer investasi.

Sejak 2020, berdasarkan jumlah produk yang terbit menunjukkan peningkatan, namun dari sisi nilai AUM mengalami penurunan pada tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya.



Hingga Desember 2025, total *Assets Under Management* (AUM) reksa dana berbasis ESG yang beredar di pasar modal Indonesia telah mencapai IDR 9,98 triliun (USD596,96 juta). Dari total nilai AUM tersebut, didominasi oleh reksa dana indeks yang mencapai 52,88%, diikuti reksa dana pendapatan tetap, dan *exchange traded fund* (ETF). Diagram lingkaran di samping menunjukkan proporsi reksa dana berbasis ESG berdasarkan jenis reksa dana.

AUM Produk Investasi Berkelanjutan Berdasarkan Jenis



Bursa Karbon

Dalam rangka percepatan pengurangan emisi gas rumah kaca dan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam NDCs, Indonesia meluncurkan Bursa Karbon pada September 2023 untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari pelaku usaha dalam mendukung target pengurangan emisi karbon di Indonesia. Peluncuran tersebut didasarkan pada Peraturan OJK Nomor 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK 14), beserta Surat Edaran Nomor 12/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (SEOJK 12). Selanjutnya pada bulan Januari 2025, Indonesia meluncurkan Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia, untuk menarik investor internasional agar dapat berpartisipasi dalam perdagangan unit karbon di bursa karbon Indonesia. Peluncuran tersebut menjadi pencapaian strategis Indonesia di kancah global.

Dalam upaya membangun ekosistem karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil, Pemerintah Indonesia telah memperkuat elemen-elemen penting dalam ekosistem karbon, yang meliputi penguatan: (1) Sistem Registri Nasional (SRN); (2) Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (*Measurement, Reporting, and Verification - MRV*); (3) Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK); serta (4) Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* (CA) dalam perdagangan karbon internasional.

Berdasarkan data Bursa Karbon Indonesia per Desember 2025, terdapat 9 proyek Sertifikat Pengurangan Emisi - Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang tercatat dengan total 150 Pengguna Jasa Bursa Karbon yang didominasi oleh sektor energi dan sektor

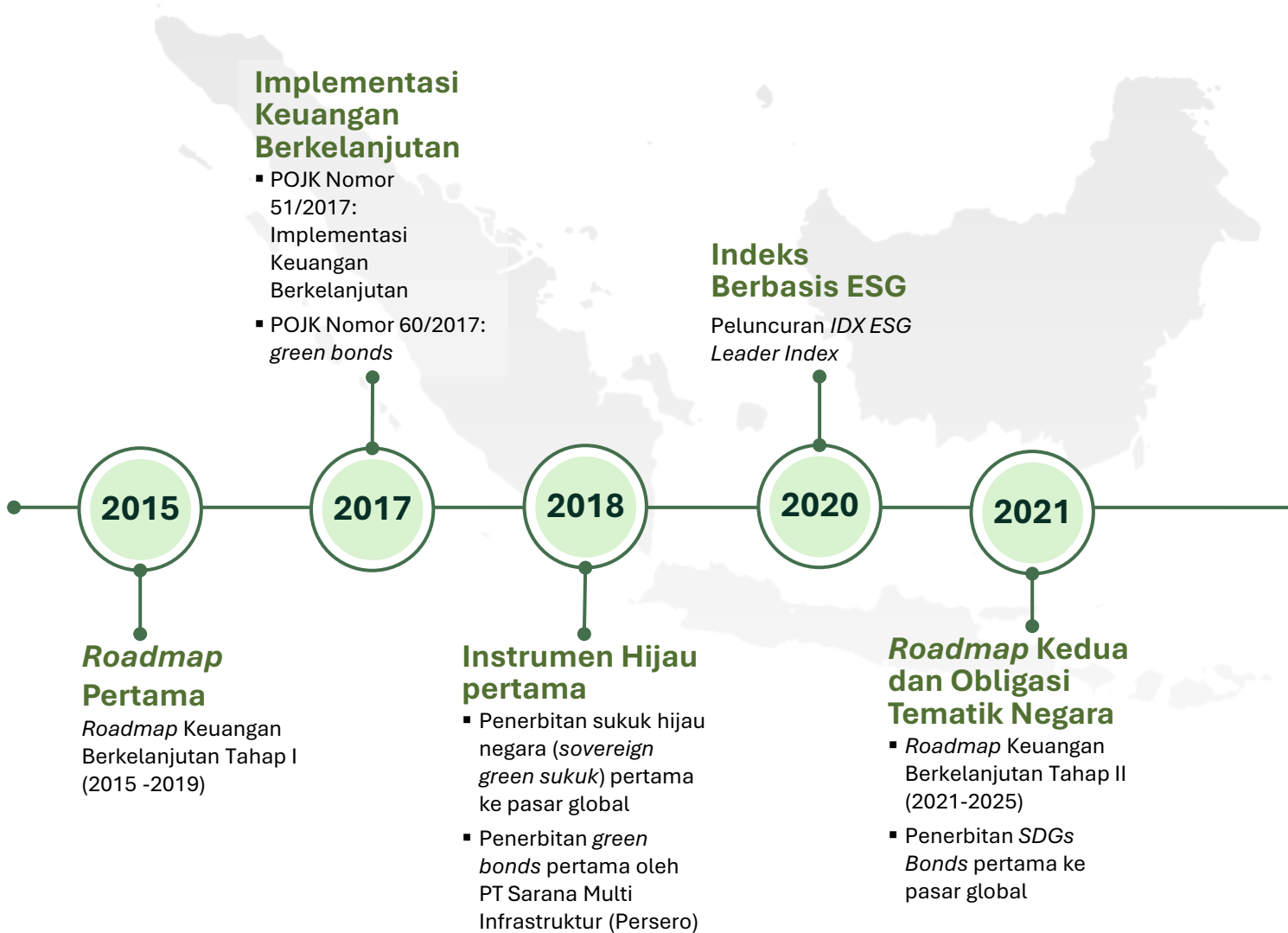
lainnya di luar NDCs. Adapun data perdagangan sejak diluncurkan pada September 2023 hingga akhir tahun 2025 menunjukkan total volume transaksi sebesar 1.811.933 ton CO₂e dengan nilai transaksi sebesar Rp87 miliar.

Sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai mekanisme perdagangan karbon bagi sektor jasa keuangan, sekaligus merespon peningkatan partisipasi dalam pasar karbon, OJK menerbitkan buku dengan judul “Menenal dan Memahami Perdagangan Karbon di Indonesia”. Buku tersebut menguraikan kerangka kebijakan, regulasi, dan kelembagaan yang mendukung operasionalisasi perdagangan karbon di Indonesia, dengan penekanan pada prinsip transparansi, integritas, dan keberlanjutan.

Selanjutnya pada tahun 2025, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional, yang menggantikan Perpres 98 Tahun 2021. Perpres 110 tersebut mengatur mekanisme perdagangan karbon, pungutan karbon, dan insentif berbasis kinerja. Dalam rangka implementasi Perpres 110 tersebut OJK bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait berkolaborasi dalam melakukan harmonisasi peraturan pelaksana perdagangan karbon dan penguatan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia.

Lini Waktu

Perkembangan Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia



Taksonomi Hijau

Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia 1.0

2022

2023

2024

2025

Taksonomi Keuangan Berkelanjutan, CRMS, dan Obligasi/Sukuk Tematik

- Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Ver 1
- Panduan *Climate Risk Management & Scenario Analysis* (CRMS) untuk perbankan
- *Sustainability sukuk* pertama oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- *Sustainability-linked bonds* pertama oleh PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk

Bursa Karbon dan Obligasi/Sukuk Tematik

- POJK Nomor 14/2023: Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
- Peluncuran Bursa Karbon Indonesia
- POJK Nomor 18/2023: Obligasi dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan
- Penerbitan Sukuk dan Obligasi Sosial pertama oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- Penerbitan *sovereign blue bonds* pertama ke pasar global

Bursa Karbon International dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan

- Peluncuran perdagangan internasional perdana unit karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia
- Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Ver 2



PEMANGKU KEPENTINGAN PASAR MODAL BERKELANJUTAN INDONESIA

“Setiap pemangku kepentingan memiliki peran penting yang mencerminkan komitmen mereka dalam mendukung pengembangan pasar modal berkelanjutan.”

Kegiatan pasar modal berkelanjutan di Indonesia melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut dapat berasal dari pemerintah, kementerian, regulator, pelaku industri keuangan, masyarakat, serta pemangku kepentingan relevan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran penting yang mencerminkan komitmen mereka dalam mendukung pengembangan pasar modal berkelanjutan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan sangat esensial untuk mendorong partisipasi dalam pengembangan pasar modal berkelanjutan.

Keterlibatan dan kolaborasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh OJK dalam mengimplementasikan seluruh prioritas dalam *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan ini. Keterlibatan dengan pemangku kepentingan yang relevan dan signifikan bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai minat dan ekspektasi pemangku kepentingan yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan inisiatif untuk mendorong pasar modal berkelanjutan. Keterlibatan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan hasil yang ditargetkan atas prioritas yang tercantum dalam *roadmap*. Selanjutnya, kolaborasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan prioritas berjalan dengan lancar. Berikut pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dan berpengaruh secara signifikan dalam pasar modal berkelanjutan antara lain:

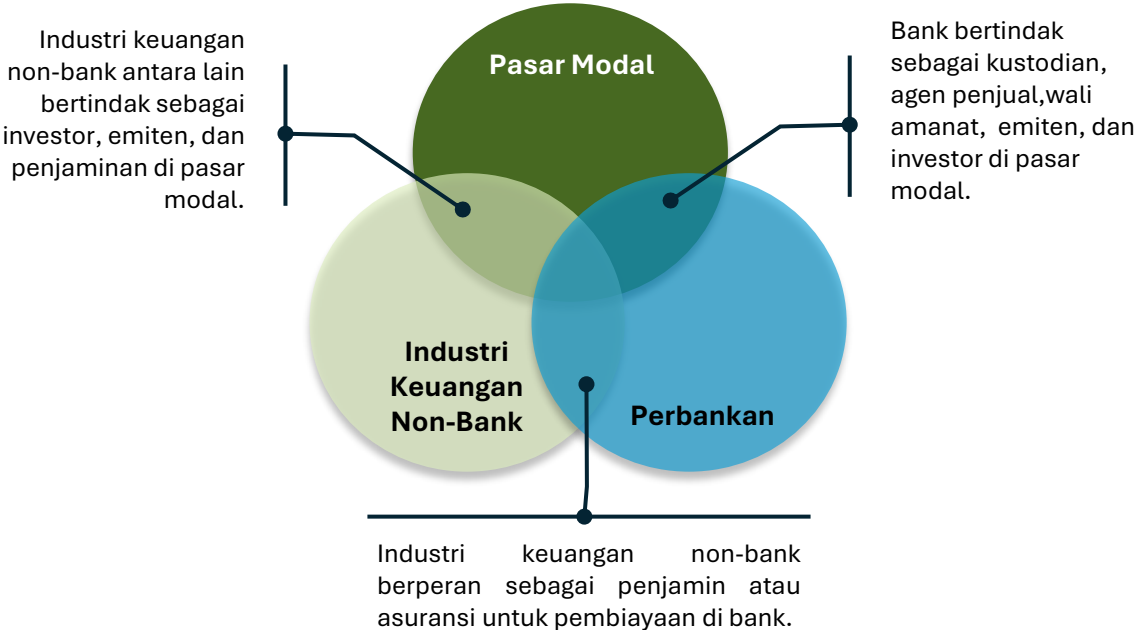
Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dan pengaruh signifikan dalam pasar modal berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk pasar modal. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan regulasi (seperti kebijakan perpajakan, insentif, dan lainnya) yang mendukung iklim investasi, sangat krusial dalam mendorong pasar modal berkelanjutan. Selain itu, dalam mengembangkan pasar modal berkelanjutan, dibutuhkan dukungan dari kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan lainnya.

Pasar modal berkelanjutan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian komitmen nasional dalam mitigasi dampak perubahan iklim dan tujuan pembangunan nasional yang tercakup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, serta mendukung pembangunan di tingkat daerah. Pasar modal berkelanjutan menawarkan akses luas terhadap sumber dana yang dibutuhkan pemerintah melalui penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan serta produk berkelanjutan lainnya. Mengingat adanya kepentingan timbal balik antara pemerintah dan pasar modal berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa sangat penting membangun kolaborasi yang kuat antara regulator pasar modal dan pemerintah untuk mewujudkan pasar modal berkelanjutan yang berkembang dan tangguh.

Sektor dalam Industri Jasa Keuangan

Industri keuangan yang diawasi oleh OJK mencakup tiga sektor utama, yaitu perbankan, pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank (IKNB) yang meliputi dana pensiun, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lainnya. Ketiga sektor ini memiliki peran yang saling terkait. Dari perspektif pasar modal, bank memiliki peran penting sebagai entitas pendukung dalam kegiatan pasar modal, seperti bank kustodian, wali amanat, dan agen penjual produk pasar modal. Selain itu, bank juga berperan sebagai emiten dan investor pada instrumen pasar modal. Dari sektor IKNB, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, serta perusahaan pembiayaan dapat berperan sebagai investor institusi yang menanamkan dananya pada produk pasar modal. Selain itu, juga dapat berperan sebagai emiten yang menerbitkan efek di pasar modal dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaannya.



Dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pasar modal dan sektor keuangan lainnya, penting untuk menghubungkan sektor-sektor tersebut dalam mendorong pasar modal berkelanjutan melalui kebijakan dan regulasi yang selaras dan saling mendukung. Sebagai contoh, di sektor pasar modal, OJK mengeluarkan kebijakan untuk mendorong penerbitan produk pasar modal berkelanjutan, sementara di sektor perbankan dan non-perbankan, OJK mengeluarkan kebijakan untuk mendorong investasi pada produk pasar modal berkelanjutan.

Pelaku Pasar Modal

Pasar modal berkelanjutan melibatkan berbagai pelaku, antara lain SROs, emiten, manajer investasi, perusahaan efek, profesi dan lembaga penunjang, serta pihak terkait lainnya. Pengembangan pasar modal berkelanjutan memerlukan dukungan aktif dari seluruh para pemangku kepentingan tersebut.

Oleh karena itu, upaya penguatan pasar modal berkelanjutan perlu difokuskan pada pembangunan kesadaran dan peningkatan komitmen para pelaku pasar dalam menerapkan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan. Selain itu, untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan, strategi pengembangan pasar modal berkelanjutan juga perlu memperhatikan kepentingan serta ekspektasi pelaku pasar modal, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat diterima, berjalan efektif, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak tersebut.

Pemangku Kepentingan Lainnya

Selain pemangku kepentingan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pemangku kepentingan lain yang memiliki peran penting dan berpengaruh signifikan dalam pengembangan pasar modal berkelanjutan antara lain bank sentral, akademisi, dan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran strategis dalam mendukung pasar modal berkelanjutan.

Bank Indonesia selaku bank sentral, memiliki berbagai kebijakan dalam mendukung keuangan hijau, kebijakan tersebut antara lain pemberlakuan *Loan-to-Value* (LTV) untuk kredit properti dan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) berwawasan lingkungan, kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) *averaging* kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor tertentu, inklusif termasuk usaha ultra mikro, berwawasan lingkungan, dan lainnya. Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan Kalkulator Hijau sebagai alat pendukung pengembangan keuangan berkelanjutan.

Di sisi lain, akademisi juga memiliki peranan penting yang mencakup pengenalan dan penguatan prinsip keberlanjutan kepada mahasiswa yang nantinya akan berpartisipasi di pasar modal berkelanjutan. Sementara itu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan keberlanjutan yang dibiayai melalui pasar modal, tetapi juga berpotensi sebagai investor dalam berbagai instrumen keuangan berkelanjutan yang tersedia.

BAB 3

TANTANGAN DAN PELUANG PASAR MODAL BERKELANJUTAN

Pasar modal berkelanjutan Indonesia berada di titik krusial, di mana kondisi infrastruktur pasar, *supply* dan *demand* produk berkelanjutan, serta kedalaman basis investor saat ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Dengan berkomitmen untuk mengembangkan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung perubahan iklim, demografi, dan industri di Indonesia, Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk mengubah ekosistem keuangannya menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan yang selaras dengan iklim dan pembangunan inklusif. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan pasar modal berkelanjutan dirangkum sebagai berikut:



TANTANGAN



Perlunya Penyelarasan Kebijakan

Salah satu tantangan untuk menumbuhkan pasar modal berkelanjutan adalah perlunya peningkatan harmonisasi kebijakan antar regulator dan kementerian/lembaga, guna meminimalkan potensi ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan bagi pelaku pasar. Dinamika regulasi dan kebijakan yang beragam menuntut koordinasi dan penyelarasan yang berkelanjutan guna mendukung kepatuhan serta mempercepat penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, regulator dan kementerian terkait perlu berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka membangun kerangka kebijakan keuangan berkelanjutan yang selaras.



Insentif

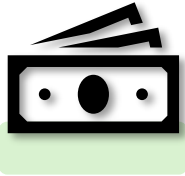
Insentif yang ditargetkan untuk penerbitan obligasi hijau (*green bonds*) serta pembiayaan kendaraan listrik telah diberikan kepada publik. Namun demikian, insentif ini masih belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelaku pasar yang memiliki tingkat kesadaran dan kapasitas keuangan berkelanjutan yang terbatas. Oleh karena itu, pelaku pasar dari sisi *supply* maupun *demand* memerlukan dukungan insentif yang lebih signifikan dan beragam, seperti insentif perpajakan ataupun insentif lainnya, guna mendorong partisipasi yang lebih luas.



Minimnya Pemahaman

Pada umumnya, tingkat pemahaman investor dan pelaku pasar tentang keuangan berkelanjutan masih relatif terbatas. Sebagian besar investor ritel di Indonesia masih memiliki pemahaman yang minim tentang keuangan berkelanjutan⁹, manfaat investasi berkelanjutan, dan target dekarbonisasi Indonesia. Kesenjangan pengetahuan ini berdampak pada minat investor terhadap produk berkelanjutan. Demikian halnya, sebagian pelaku pasar modal lainnya juga memiliki keterbatasan pemahaman mengenai keuangan berkelanjutan. Hal ini memberikan tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam keputusan investasi dan kegiatan usaha.

⁹ OJK, NATIONAL SURVEY ON FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION 2024, 2024. Available at: <https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-And-Statistics-Indonesia-Present-National-Survey-On-Financial-Literacy-And-Inclusion-2024-Findings.aspx>



Preferensi Investor

Sebagian investor institusi masih mengutamakan keuntungan finansial dengan pertimbangan yang terbatas atau tanpa mempertimbangkan faktor keberlanjutan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi emiten dalam menawarkan produk keberlanjutan. Untuk menarik lebih banyak investor, emiten harus menawarkan imbal hasil yang tinggi, di sisi lain, emiten juga dihadapkan dengan tantangan biaya dan upaya ekstra dalam penerbitan instrumen berlandaskan keberlanjutan. Diharapkan preferensi investor akan bergeser pada keberlanjutan, sehingga hal ini akan mendorong peningkatan permintaan atas produk berlandaskan keberlanjutan sehingga emiten dapat menikmati “*green premium*” yang akan mengurangi *cost of fund* emiten.



Kesenjangan Kapasitas Pelaku Pasar

Pelaku pasar modal, antara lain emiten, intermediari, profesi dan lembaga penunjang, dan pelaku pasar lainnya, masih memiliki keterbatasan kapasitas dan keahlian teknis dalam melakukan penerbitan, penentuan harga, dan pengungkapan informasi terkait keuangan berkelanjutan secara efektif. Kesenjangan kapasitas ini dapat meningkatkan risiko *greenwashing*, menurunkan kecenderungan pelaku pasar untuk berinvestasi pada produk yang selaras dengan ESG, sehingga secara keseluruhan menciptakan hambatan bagi pertumbuhan pasar modal lebih lanjut¹⁰.



Keterbatasan Diversifikasi Produk Berkelanjutan

Jika dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju di ASEAN, Indonesia masih mencatat volume penerbitan produk berkelanjutan yang relatif rendah, terutama pada obligasi dan sukuk berkelanjutan dan reksa dana berbasis ESG. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dalam penerbitan produk berkelanjutan, termasuk kebutuhan upaya dan biaya tambahan serta terbatasnya pemahaman terhadap keunggulan produk, banyak perusahaan yang masih cenderung memprioritaskan penerbitan produk konvensional dibandingkan produk berkelanjutan.

¹⁰ G20 Sustainable Finance Working Group, G20 Sustainable Finance Report, 2022. Available at: <https://g20sfwg.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-G20-Sustainable-Finance-Report-2.pdf>



PELUANG



Komitmen Indonesia pada *Paris Agreement*

Sebagai komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement*, pemerintah telah menetapkan target *Nationally Determined Contributions* (NDCs) dalam pencapaian target penurunan gas rumah kaca dan *net-zero emission* yang relatif ambisius. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan mobilisasi pendanaan yang sangat besar. Hal ini menciptakan peluang strategis bagi pasar modal berkelanjutan untuk memobilisasi investasi domestik dan internasional guna mendukung pencapaian target dekarbonisasi nasional.



Kerangka Regulasi yang Mendukung

Pemerintah, OJK dan badan regulator lainnya, telah membangun kerangka regulasi keuangan berkelanjutan yang komprehensif dan visioner. Kebijakan, regulasi, rencana investasi, dan insentif seputar integrasi faktor-faktor ESG dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan telah hadir untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan kelembagaan bagi pasar modal berkelanjutan. Hal ini mendorong peningkatan kepercayaan investor serta pertumbuhan pasar.



Keuntungan Demografi

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia berada dalam usia produktif hingga tahun 2040, Indonesia dapat memanfaatkan peluang untuk menumbuhkan, memberi insentif, dan mengembangkan basis investor yang luas guna mendorong pertumbuhan pasar modal di masa mendatang. Sebagai contoh, jumlah *Single Investor Identifications* (SID), yang telah tumbuh hingga hampir 20,2 juta SID, dengan 79% didominasi generasi di bawah 40 tahun¹¹. Seiring dengan meningkatnya literasi keuangan dan akses ke pasar modal, bonus demografi ini dapat mendorong penerbitan dan perdagangan produk-produk yang selaras dengan ESG, terutama melalui platform digital.



Industri yang Bertumbuh

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, pemerintah Indonesia sangat bergantung pada pertumbuhan industri. Meningkatnya spesialisasi, kemajuan teknologi, dan integrasi pertimbangan iklim dalam proses industri menawarkan peluang investasi berskala luas yang selaras dengan tujuan iklim dan modernisasi industri. Sejalan dengan itu, target pengurangan emisi untuk industri juga mendiversifikasi sumber investasi berkelanjutan, terutama melalui pasar karbon yang terus berkembang.

¹¹ OJK, "Pasar Modal Indonesia Menguat dan Berintegritas Sepanjang 2025" (Indonesia Stock Exchange Closing Ceremony 2025)", News, 2025. Available at: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Penutupan-Perdagangan-Bursa-Efek-Indonesia-Tahun-2025.aspx>

BAB 4

ROADMAP

PASAR MODAL BERKELANJUTAN INDONESIA 2026 - 2030

Roadmap ini disusun dalam tiga tingkatan untuk memberikan kejelasan arah serta menggambarkan strategi utama yang akan dilaksanakan. Ketiga tingkatan tersebut terdiri atas pilar, prioritas, dan rencana aksi. Untuk mendukung implementasi *roadmap*, ditetapkan pula sejumlah faktor pendukung (*enabler*). Dengan struktur tersebut, OJK memastikan bahwa tujuan strategis tersampaikan secara jelas, pelaksanaan prioritas selaras dengan tujuan utama pembangunan pasar modal berkelanjutan, serta kemajuan implementasi dapat dilaksanakan dengan terarah dan diukur secara efektif.

ROADMAP PASAR MODAL BERKELANJUTAN INDONESIA 2026 - 2030



SASARAN

“Mengembangkan ekosistem pasar modal berkelanjutan yang berdaya saing global”



Pilar I

Memperkuat
Fondasi Pasar
Modal
Berkelanjutan

**5 Prioritas
12 Rencana Aksi**



Pilar II

Menumbuhkan
Aktivitas Pasar
Modal
Berkelanjutan

**4 Prioritas
11 Rencana Aksi**



Pilar III

Mendorong
Partisipasi
dalam Pasar
Modal
Berkelanjutan

**4 Prioritas
7 Rencana Aksi**



Pilar IV

Memperkuat
Kolaborasi
untuk
Pengembangan
Pasar Modal
Berkelanjutan

**2 Prioritas
4 Rencana Aksi**

ENABLER

Kepemimpinan
dan Komitmen

SDM yang
Berkualitas dan
Memiliki Kesadaran

Infrastruktur
Teknologi
Informasi

Tata Kelola
yang Baik



SASARAN

“Mengembangkan ekosistem pasar modal berkelanjutan yang berdaya saing global”



Pilar I

Memperkuat
Fondasi Pasar
Modal
Berkelanjutan

Prioritas 1

Mendorong penggunaan taksonomi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pasar modal berkelanjutan

Prioritas 2

Mengintegrasikan ESG dalam aktivitas bisnis serta pengungkapan keberlanjutan oleh emiten dan perusahaan publik

Prioritas 3

Mengintegrasikan ESG dalam aktivitas bisnis serta pengungkapan keberlanjutan oleh pelaku pasar modal lainnya

Prioritas 4

Mengembangkan ekosistem data untuk mendukung integrasi ESG dalam pasar modal

Prioritas 5

Memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap integrasi ESG dalam aktivitas pelaku pasar modal



Pilar II

Menumbuhkan
Aktivitas Pasar
Modal
Berkelanjutan

Prioritas 6

Mengembangkan pasar obligasi dan sukuk berkelanjutan

Prioritas 7

Mengembangkan pasar saham dan produk investasi berkelanjutan

Prioritas 8

Mengembangkan keuangan transisi (*transition finance*) di sektor pasar modal

Prioritas 9

Mendorong partisipasi di bursa karbon



Pilar III

Mendorong
Partisipasi dalam
Pasar Modal
Berkelanjutan

Prioritas 10

Mendorong peran SROs dalam mengembangkan pasar modal berkelanjutan

Prioritas 11

Mengembangkan berbagai jenis stimulus untuk mendorong pertumbuhan pasar modal berkelanjutan

Prioritas 12

Mengembangkan profesi pendukung lainnya

Prioritas 13

Meningkatkan kapasitas dan kesadaran mengenai pentingnya pasar modal berkelanjutan



Pilar IV

Memperkuat
Kolaborasi untuk
Pengembangan
Pasar Modal
Berkelanjutan

Prioritas 14

Mendorong koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga

Prioritas 15

Membangun kolaborasi dengan lembaga internasional

ENABLER

Kepemimpinan
dan Komitmen

SDM yang
Berkualitas dan
Memiliki
Kesadaran

Infrastruktur
Teknologi
Informasi

Tata Kelola
yang Baik

SASARAN ROADMAP:



” Mengembangkan ekosistem pasar modal berkelanjutan yang berdaya saing global”

Sasaran *roadmap* ini adalah "**Mengembangkan ekosistem pasar modal berkelanjutan yang berdaya saing global**". Sasaran ini merupakan langkah terpadu untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui aktivitas pasar modal yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam praktik bisnis. Sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

Mengembangkan ekosistem pasar modal berkelanjutan

Roadmap ini bertujuan untuk membangun sebuah ekosistem yang komprehensif, yang memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan di pasar modal, baik bagi regulator, pelaku pasar modal, maupun pemangku kepentingan lainnya. Ekosistem ini berfokus pada kerangka regulasi dan kebijakan pendukung, insentif, produk yang memfasilitasi investasi dan pendanaan berkelanjutan, pusat data keberlanjutan, profesi pendukung, serta infrastruktur pendukung lainnya. Ekosistem ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pasar modal berkelanjutan.

Salah satu faktor pendorong untuk membangun pasar modal berkelanjutan adalah komitmen untuk mendukung tujuan ekonomi dan lingkungan pemerintah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Pasar modal berkelanjutan berperan dalam memobilisasi arus permodalan domestik dan internasional untuk proyek-proyek yang sejalan dengan prinsip ESG dalam rangka pencapaian target *net zero* pada tahun 2060 atau lebih awal, seperti proyek energi terbarukan, efisiensi energi, infrastruktur yang tahan iklim, atau teknologi bersih.

Dengan memperluas jangkauan instrumen keuangan hijau, sosial, dan transisi yang tersedia di pasar modal, termasuk obligasi, sukuk, dan produk pasar karbon, Indonesia akan mampu menarik basis investor yang lebih luas dan memperdalam likuiditas pasar. Selain memobilisasi permodalan, pasar modal berkelanjutan juga mendorong pelaku pasar untuk mengintegrasikan pertimbangan ESG dalam setiap aspek bisnis. Integrasi tersebut akan memengaruhi cara perusahaan beroperasi dan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, sekaligus mendukung terwujudnya transisi yang adil menuju *net zero economy*.

Menciptakan pasar modal berkelanjutan yang berdaya saing global

Roadmap ini bertujuan untuk menyelaraskan pasar modal berkelanjutan Indonesia dengan standar dan praktik di global dalam rangka mempercepat interoperabilitas dengan pasar internasional, membangun kepercayaan investor serta memfasilitasi investasi lintas batas pada obligasi dan sukuk berbasis ESG dan instrumen karbon. Selain itu, *roadmap* ini juga bertujuan untuk meningkatkan capaian, fungsi dan tata kelola pasar modal berkelanjutan agar penerbit dalam negeri terdorong untuk berinovasi, melakukan transaksi secara transparan, serta memanfaatkan keuangan berkelanjutan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Keselarasan dengan standar dan praktik internasional tersebut diharapkan dapat menjadikan pasar modal Indonesia sebagai tujuan investasi bagi pelaku pasar global.

PROGRAM UNGGULAN



Pilar I

Memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan

- Penggunaan TKBI dalam pengembangan kebijakan dan praktik pasar modal berkelanjutan. Contoh: pemilihan proyek hijau dan transisi untuk obligasi dan sukuk berlandaskan keberlanjutan berdasarkan TKBI, *green equity designation*.
- Penyusunan peraturan dan/atau panduan dalam mengintegrasikan nilai ESG dalam aktivitas bisnis emiten, perusahaan publik, dan pelaku pasar modal lainnya.
- Pembangunan pusat data pasar modal berkelanjutan terintegrasi, antara lain mencakup data produk berkelanjutan, emisi karbon pelaku pasar, penerapan ESG, dan lainnya.
- Pembangunan *tools* pengawasan kepatuhan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di pasar modal.



Pilar II

Menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan

- Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait EBUS Berlandaskan Keberlanjutan (EBUS BK) dengan tema baru seperti *blue bonds/sukuk*, *nature financing products*.
- Digitalisasi EBUS BK (pelaporan, dokumen pendaftaran, bentuk efek, dan perdagangannya).
- Penyusunan regulasi dan/atau panduan terkait produk pengelolaan investasi berkelanjutan (*sustainable funds*).
- Penyusunan regulasi dan/atau panduan terkait keuangan transisi (*transition finance*) di sektor pasar modal.



Pilar III

Mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan

- Pemberian insentif untuk sisi *demand* dan *supply* produk pasar modal berkelanjutan.
- Penyusunan kebijakan relaksasi untuk kegiatan pasar modal berkelanjutan.
- Penyusunan regulasi dan/atau panduan bagi profesi terkait pasar modal berkelanjutan seperti penyedia reviu eksternal untuk penerbitan EBUS BK.



Pilar IV

Memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan

- Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga untuk:
 - ✓ mendukung pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dan ekosistem perdagangan karbon yang kuat dan komprehensif.
 - ✓ harmonisasi kebijakan pasar modal berkelanjutan dengan peraturan di bidang lain di bawah pengawasan OJK dan Kementerian dan Lembaga.
- Melakukan kolaborasi dengan lembaga internasional.
- Keterlibatan OJK dalam penyusunan standar internasional dan inisiatif pasar modal berkelanjutan di wilayah regional dan global.

TARGET KUANTITATIF

55,11%

Pertumbuhan nilai akumulasi penerbitan **Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan** diharapkan sebesar 55,11% per tahun.

14,36%

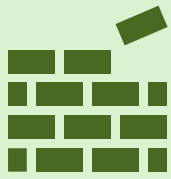
Pertumbuhan nilai aktiva bersih **produk investasi berkelanjutan** diharapkan sebesar 14,36% per tahun.

PROYEKSI PERTUMBUHAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK BERKELANJUTAN KORPORASI 2026 -2030

		Des 2025	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
Nilai Akumulasi Penerbitan	Rp Triliun	74,14	115	178,37	276,66	429,12	665,60
Nilai Penerbitan	Rp Triliun	35,56	40,86	63,37	98,29	152,46	236,48
Emiten baru (new entry)	Satuan angka	3	7	10	16	25	38
Akumulasi Emiten	Satuan angka	15	22	32	48	73	111

PROYEKSI PERTUMBUHAN PRODUK INVESTASI BERKELANJUTAN 2026 -2030

		Des 2025	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp Triliun	9,98	11,41	13,05	14,93	17,07	19,52



PILAR I

MEMPERKUAT FONDASI PASAR MODAL BERKELANJUTAN

“Penguatan fondasi dilakukan melalui kebijakan, regulasi, dan pedoman yang mendorong transparansi, konsistensi, dan kepercayaan dalam rangka penerapan prinsip keberlanjutan di pasar modal.”

Tujuan dari pilar ini adalah untuk memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan di Indonesia. Penguatan fondasi dilakukan melalui kebijakan, regulasi, dan pedoman yang mendorong transparansi, konsistensi, dan kepercayaan dalam rangka penerapan prinsip keberlanjutan di pasar modal. Pelaku pasar modal akan mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengurangi risiko kepatuhan maupun risiko *greenwashing*. OJK akan bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, serta pelaku pasar, untuk memperkuat kebijakan, regulasi, serta pedoman yang akan membantu mengarahkan aliran dana menuju transisi ekonomi Indonesia rendah karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan tersebut, pilar ini terdiri dari lima prioritas sebagai berikut:

Prioritas 1

Mendorong penggunaan taksonomi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pasar modal berkelanjutan

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dikembangkan secara kolaboratif dengan berbagai Kementerian dan Lembaga, dan diterbitkan oleh OJK untuk membantu meningkatkan alokasi modal serta menyalurkan pembiayaan berkelanjutan menuju aktivitas ekonomi yang berkontribusi pada target *net zero* nasional. Sebagai sistem klasifikasi yang baru dibentuk, OJK mendorong penggunaan TKBI dalam kebijakan keuangan berkelanjutan dan aktivitas pasar modal guna memastikan adanya persamaan definisi aktivitas ekonomi yang selaras dengan SDGs. Berikut rencana aksi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut:



Rencana Aksi 1.1

Mengembangkan kebijakan pasar modal berkelanjutan yang sejalan dengan TKBI

OJK akan memastikan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan, penerbitan, pengelolaan produk berkelanjutan, pengungkapan dan pelaporan ESG, insentif dan disinsentif, serta pengawasan regulasi memenuhi definisi aktivitas berkelanjutan dan alokasi modal berkelanjutan yang sejalan dengan TKBI. OJK akan mendorong pembentukan indeks bertema keberlanjutan atau produk investasi berbasis ESG yang mengacu pada kriteria TKBI. Penerapan TKBI dalam pengembangan kebijakan pasar modal berkelanjutan akan meminimalkan risiko perbedaan interpretasi terkait investasi berkelanjutan dan praktik *greenwashing*, serta mempermudah akses pelaku pasar (termasuk UMKM) terhadap pendanaan berkelanjutan.

Rencana Aksi 1.2

Mendorong penggunaan TKBI dalam praktik pasar modal berkelanjutan

Selain pada kebijakan dan regulasi, OJK akan mendukung emiten, investor, dan pelaku pasar lainnya dalam membangun pemahaman dan penggunaan TKBI. OJK memfasilitasi pelaku pasar dengan *Taxonomy Navigator* sebagai alat bantu diseminasi yang memiliki fitur pencarian aktivitas dan kriteria TKBI (*explorer*) serta fitur simulasi penilaian *step-by-step* (*simulator*). Sebagai contoh, *tool* ini dapat membantu pelaku pasar dalam menilai proyek atau aktivitas yang selaras dengan TKBI untuk penerbitan obligasi dan sukuk berlandaskan keberlanjutan, atau menyusun rencana transisi sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi investasi atau bisnis. Dorongan terhadap penggunaan TKBI ini akan membantu pelaku pasar dalam mengintegrasikan ESG dalam aktivitas bisnisnya.

Prioritas 2

Mengintegrasikan ESG dalam aktivitas bisnis serta pengungkapan keberlanjutan oleh emiten dan perusahaan publik

Mengintegrasikan ESG dalam strategi dan aktivitas bisnis akan membantu emiten dan perusahaan publik untuk lebih memahami risiko dan peluang terkait ESG, meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi, serta menarik sumber pembiayaan. Kebijakan, regulasi, dan pedoman lebih lanjut yang mendorong integrasi ESG oleh emiten dan perusahaan publik pada akhirnya akan mendukung ketahanan iklim perekonomian Indonesia dan berkontribusi pada pertumbuhan pasar modal berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut rencana aksi yang mendukung pencapaian tujuan dimaksud:

Rencana Aksi 2.1

Mendorong emiten dan perusahaan publik untuk mengintegrasikan ESG dalam tata kelola, strategi, pengambilan keputusan investasi, dan aktivitas bisnis

Kebijakan dan standar yang mendorong integrasi faktor ESG dalam aktivitas bisnis dan fungsi strategi akan memperkuat penerapan prinsip dan praktik keberlanjutan jangka panjang oleh emiten dan perusahaan publik. OJK akan memfasilitasi penyusunan regulasi yang mengintegrasikan faktor keberlanjutan, risiko, dan peluang dalam definisi strategi bisnis jangka panjang bagi perusahaan, serta regulasi yang mengatur pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris, serta komite dalam perusahaan atas integrasi ESG dalam proses tata kelola. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu emiten dan perusahaan publik memposisikan diri secara kompetitif dalam menghadapi transisi ekonomi berkelanjutan global.

Rencana Aksi 2.2

Menyusun regulasi dan panduan untuk pelaksanaan pengungkapan keberlanjutan bagi emiten dan perusahaan publik

Persyaratan pengungkapan keberlanjutan memegang peranan penting dalam membantu emiten dan perusahaan publik mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko dan peluang keberlanjutan yang material sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membangun kepercayaan investor, memperkuat reputasi, serta menarik sumber modal. Melalui POJK 51, OJK telah mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan yang mencakup pengungkapan aspek ESG sesuai dengan standar internasional sebagai acuan. Sejalan dengan itu, setelah menyelesaikan proses adopsi standar IFRS S1 dan S2 yang ditetapkan oleh *International Sustainability Standards Board*, OJK kini tengah mengintegrasikan standar tersebut ke dalam revisi POJK 51 guna memperkuat tata kelola keberlanjutan nasional.

OJK bersama dengan pemangku kepentingan terkait, bekerja sama dalam menyusun pedoman teknis dan *capacity building* untuk memfasilitasi pelaporan keberlanjutan yang berbasis data dan berketahanan (*data-driven and robust sustainability reporting*). Persyaratan pengungkapan keberlanjutan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan praktik tata kelola pada emiten dan perusahaan publik sekaligus memperkuat pengungkapan emisi karbon *scope 1, 2, dan 3* serta standarisasi indikator kinerja ESG (termasuk metrik umum dan spesifik sektor).

Rencana Aksi 2.3

Mengembangkan regulasi dan panduan mengenai manajemen risiko iklim bagi emiten dan perusahaan publik

Risiko transisi dan fisik semakin mengancam keberlangsungan usaha emiten dan perusahaan publik melalui dampaknya terhadap rantai pasok dan rantai nilai perusahaan, termasuk perubahan permintaan konsumen. Untuk merespon hal tersebut, melalui regulasi dan panduan yang relevan, OJK mendorong emiten dan perusahaan publik untuk mempertimbangkan risiko iklim dalam sistem manajemen risiko perusahaan. Selain itu, OJK juga mendorong pemanfaatan perangkat dan database yang memadai serta relevan untuk membantu identifikasi risiko iklim. Upaya ini diharapkan dapat memungkinkan emiten dan perusahaan publik mengungkapkan secara akurat tingkat *exposure* perusahaan terhadap risiko terkait iklim serta mengambil tindakan yang tepat guna menjaga keberlanjutan dan kegiatan usaha perusahaan.

Prioritas 3

Mengintegrasikan ESG dalam aktivitas bisnis serta pengungkapan keberlanjutan oleh pelaku pasar modal lainnya

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK), pelaku usaha sektor keuangan wajib menyusun laporan keberlanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, pelaku pasar selain emiten dan perusahaan publik dihadapkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan faktor ESG ke dalam bisnis perusahaan guna menjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang di tengah meningkatnya risiko dan peluang terkait ESG. Seiring dengan itu, permintaan terhadap produk keuangan dan modal berbasis ESG diperkirakan akan meningkat, membuka peluang bisnis baru bagi pelaku pasar modal. Di saat yang sama, risiko ESG mengancam stabilitas dan keandalan sistem keuangan. Pelaku pasar modal seperti manajer investasi, perusahaan efek, SROs, lembaga pemeringkat, dan pelaku pasar lainnya perlu mengintegrasikan ESG dalam aktivitas bisnis perusahaan untuk memenuhi permintaan *stakeholders* sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi perusahaan. Berikut rencana aksi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut:

Rencana Aksi 3.1

Mendorong pelaku pasar modal lainnya untuk mengintegrasikan ESG dalam tata kelola, strategi, pengambilan keputusan investasi, dan aktivitas bisnis

Mengintegrasikan ESG dalam model bisnis dan proses pengambilan keputusan investasi akan memungkinkan pelaku pasar modal mengelola eksposur risiko keuangan dengan lebih baik. Untuk mendukung tujuan ini, OJK akan mengatur integrasi dan pengungkapan kinerja ESG dengan memandatkan pelaku pasar modal selain emiten dan perusahaan publik untuk mengintegrasikan ESG dan dampak keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan strategis dan investasi. Inisiatif ini akan mendorong pelaku pasar dalam memberikan kontribusi pada pasar modal berkelanjutan serta menjaga stabilitas keuangan.

Rencana Aksi 3.2

Menyusun regulasi dan panduan pengungkapan keberlanjutan bagi pelaku pasar modal lainnya

Pengungkapan keberlanjutan merupakan hal penting bagi investor institusi, manajer investasi, lembaga pemeringkat, dan pelaku pasar modal lainnya karena memungkinkan penilaian risiko yang lebih komprehensif, mendukung alokasi modal yang tepat, serta membantu menyelaraskan portofolio investasi dan pembiayaan dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang dan ekspektasi pemangku kepentingan. OJK telah menetapkan kewajiban pelaporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik melalui POJK 51. Sebagai turunan atas POJK 51, guna mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor pasar modal yang lebih luas. OJK juga telah menerbitkan pedoman bagi perusahaan efek dan manajer investasi dalam menerapkan keuangan berkelanjutan pada tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya, melalui revisi POJK 51 yang sedang dilakukan, OJK memperluas cakupan institusi yang wajib melakukan pengungkapan keberlanjutan dalam laporan keberlanjutan. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko *greenwashing* bagi pelaku pasar modal.

Rencana Aksi 3.3

Menyusun panduan prinsip *stewardship* dan/atau prinsip investasi bertanggung jawab bagi manajer investasi

Pasar modal berkelanjutan sangat bergantung pada transparansi dan kepercayaan yang tinggi guna membuka dan mengarahkan arus modal ke aktivitas hijau dan transisi, serta mendorong partisipasi pasar yang lebih luas. Dalam konteks tersebut, prinsip *stewardship* menjadi kerangka penting yang mengatur bagaimana manajer investasi harus secara sistematis memberikan pengaruh pada perusahaan dimana mereka berinvestasi (*investee*) untuk melindungi pembentukan nilai jangka panjang (*long-term value*) bagi pemegang saham serta mendukung likuiditas dan transparansi pasar. Sejalan dengan hal tersebut, OJK akan mengembangkan dan mendorong penerapan *stewardship code* dengan mengacu pada praktik terbaik internasional, guna memastikan keterlibatan investor secara aktif untuk mendorong integrasi dan pemantauan aspek ESG dalam tata kelola perusahaan (*investee*). Melalui penerapan *stewardship code* ini, investor diharapkan dapat menggunakan hak dan kewajiban secara optimal.

Rencana Aksi 3.4

Mengembangkan regulasi dan panduan mengenai manajemen risiko iklim bagi pelaku pasar modal lainnya

Risiko iklim, baik yang bersifat fisik maupun transisi, memiliki implikasi yang semakin signifikan terhadap stabilitas keuangan, kinerja portofolio, dan keberlanjutan model bisnis pelaku pasar modal. Risiko iklim dapat berdampak lintas entitas di seluruh ekosistem pasar modal, tidak hanya terbatas pada emiten dan perusahaan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK juga akan memusatkan perhatiannya pada pelaku pasar modal selain emiten dan perusahaan publik dalam hal manajemen risiko iklim. Integrasi faktor ESG dalam manajemen risiko iklim pada entitas seperti manajer investasi, perusahaan efek, lembaga penunjang pasar modal, dan pihak lain yang relevan tersebut akan mengurangi ekposur entitas terhadap risiko iklim. OJK akan menyusun regulasi atau panduan manajemen risiko iklim yang diharapkan dapat mendorong peningkatan ketahanan pelaku pasar modal terhadap dampak perubahan iklim, meningkatkan kualitas pengungkapan dan transparansi risiko, serta mendukung pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, upaya ini akan berkontribusi pada penguatan integritas, efisiensi, dan daya saing pasar modal berkelanjutan Indonesia.

Prioritas 4

Mengembangkan ekosistem data untuk mendukung integrasi ESG dalam pasar modal

Pengembangan pasar modal berkelanjutan memerlukan ketersediaan ekosistem data ESG yang kuat, andal, dan mudah diakses guna mendukung pengambilan keputusan investasi, manajemen risiko serta pembiayaan yang berbasis risiko dan peluang keberlanjutan. Selain itu, ketersediaan ekosistem data ESG yang berkualitas akan meningkatkan transparansi serta memudahkan pelaku pasar modal dan pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis. Oleh sebab itu, untuk mendukung adopsi keuangan berkelanjutan secara efektif dan konsisten diperlukan pengembangan ekosistem data terintegrasi dan komprehensif.

Rencana Aksi 4.1

Mengembangkan kerangka kebijakan dan infrastruktur pendukung untuk membangun ekosistem data terintegrasi

Membangun kebijakan dan infrastruktur data yang kuat merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa data ESG tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki integritas dan kualitas tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pengambilan keputusan investasi dan penerapan keberlanjutan. OJK bekerja sama dengan pemangku kepentingan akan mendukung pembentukan kerangka kebijakan serta infrastruktur ekosistem data ESG. Upaya ini akan diwujudkan melalui pengaturan pengungkapan keberlanjutan serta penyediaan data instrumen berlandaskan keberlanjutan dalam format digital yang mudah diakses. Selain itu, OJK akan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan teknologi, seperti *blockchain* dan *artificial intelligence* dalam pengelolaan data ESG sehingga dapat meningkatkan efisiensi, keandalan serta kecepatan ketersediaan data ESG bagi pelaku pasar.

Prioritas 5

Memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap integrasi ESG dalam aktivitas pelaku pasar modal

Pengawasan diperlukan untuk menjaga integritas dan stabilitas pasar serta menyelaraskan fungsi sistem keuangan dengan kebijakan dan langkah keberlanjutan yang diterapkan oleh OJK dan pemangku kepentingan. Pada saat yang sama, pelaku pasar modal membutuhkan pendampingan untuk implementasi yang tepat agar dapat memenuhi ketentuan serta mengurangi risiko ketidakpatuhan regulasi dan praktik *greenwashing*. OJK akan mendukung penguatan langkah-langkah pengawasan dan pendampingan guna lebih mengintegrasikan ESG dalam pasar modal Indonesia. Berikut rencana aksi yang mendukung pencapaian tujuan ini:

Rencana Aksi 5.1

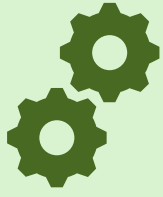
Memperkuat kegiatan pengawasan dan pendampingan penerapan keuangan berkelanjutan di sektor pasar modal

OJK akan memperkuat fungsi pengawasan melalui pendekatan berbasis risiko disertai pendampingan berkesinambungan untuk memperkuat kapasitas pelaku pasar dalam mengintegrasikan prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam aktivitas usaha. Penguatan pengawasan dan pendampingan terkait penerapan keuangan berkelanjutan, seperti penerapan TKBI atau integrasi ESG dalam proses manajemen risiko dan tata kelola oleh pelaku pasar modal, akan meningkatkan transparansi dan kredibilitas pasar untuk mewujudkan pasar modal berkelanjutan.

Rencana Aksi 5.2

Mengembangkan *supervisory tools* untuk memperkuat penilaian atas klaim ESG oleh pelaku pasar modal

OJK akan mengembangkan *tools* yang akan membantu unit pengawasan untuk memastikan bahwa klaim ESG dari pelaku pasar dapat dipercaya, akurat, dan sesuai dengan kerangka regulasi. *Tools* ini akan membantu mendeteksi dan mencegah praktik *greenwashing* serta membangun kepercayaan pada pasar modal berkelanjutan. OJK akan mengembangkan metode khusus dan *tools* yang dibuat sesuai kebutuhan (*tailored tools*) untuk mengoperasikan mekanisme pengawasan. OJK juga mendorong *preparer* laporan keberlanjutan dan penyedia jasa asuransi untuk memiliki sertifikasi terkait keberlanjutan yang memadai. Inisiatif ini akan memperkuat kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang menjaga kelancaran fungsi pasar modal berkelanjutan.



PILAR II MENUMBUHKAN AKTIVITAS PASAR MODAL BERKELANJUTAN

“Perluasan penawaran produk sangat penting untuk memenuhi peningkatan permintaan domestik dan internasional terhadap pendanaan atas aktivitas yang selaras dengan ESG.”

Tujuan dari pilar ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan diversifikasi kegiatan pasar modal berkelanjutan di Indonesia, dengan memperluas penawaran instrumen utang, ekuitas, dan produk investasi berkelanjutan, pembiayaan transisi, serta instrumen terkait karbon. Perluasan penawaran produk sangat penting untuk memenuhi peningkatan permintaan domestik dan internasional terhadap pendanaan aktivitas yang selaras dengan ESG. Dengan mendorong penerbitan dan pembiayaan produk berkelanjutan, mengembangkan standar yang kredibel, serta modernisasi pasar keuangan primer dan sekunder, pelaku pasar modal Indonesia akan memperoleh manfaat berupa mekanisme *price discovery* yang lebih baik, pendalaman likuiditas, serta efisiensi biaya pendanaan yang lebih rendah bagi proyek hijau dan transisi.

Hasil yang diharapkan dari pilar ini mencakup basis investor yang lebih luas dan beragam yang dimulai dari investor ritel hingga investor institusi global, arus modal lintas batas yang lebih kuat, serta pasar yang lebih tangguh dan transparan yang mempercepat kemajuan Indonesia menuju target *net zero* dan tujuan *nature-positive*. Untuk mencapai tujuan tersebut, pilar ini dibagi ke dalam prioritas-prioritas berikut:

Prioritas 6

Mengembangkan pasar obligasi dan sukuk berkelanjutan

Pasar yang kuat bagi obligasi dan sukuk dengan tema hijau, sosial, dan tema berkelanjutan lainnya akan membantu Indonesia memperoleh pembiayaan jangka panjang dalam mendukung agenda pertumbuhan rendah karbon dan inklusif. Untuk itu, OJK akan memfasilitasi dan mendorong keterlibatan dari semua pihak, baik pelaku pasar dari sisi penawaran (*supply*) maupun permintaan (*demand*). Upaya ini ditujukan untuk mengakomodasi peningkatan permintaan maupun penawaran atas obligasi dan sukuk berlandaskan keberlanjutan di pasar domestik maupun internasional. Pencapaian tujuan tersebut akan didukung melalui penyederhanaan proses penerbitan dan pencatatan, penyesuaian peraturan dengan praktik terbaik internasional, integrasi *digital labelling tools*, serta pengembangan kapasitas investor untuk menarik modal domestik dan asing. Sebagai hasil dari upaya tersebut, diharapkan terbentuknya pasar obligasi dan sukuk berkelanjutan yang lebih dalam, likuid, dan transparan, yang mampu mendiversifikasi sumber pendanaan, menurunkan *cost of fund*, serta menempatkan Indonesia sebagai pusat regional yang kredibel untuk pembiayaan berkelanjutan berintegritas tinggi. Berikut rencana aksi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut:

Rencana Aksi 6.1

Memfasilitasi dan mendorong penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan oleh korporasi dan pemerintah daerah



Penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan oleh korporasi memiliki peran yang strategis dalam membantu Indonesia mencapai target *net zero emission* dan mengatasi permasalahan sosial. Selain korporasi, pemerintah daerah juga berperan penting dalam pencapaian hal tersebut melalui penerbitan obligasi dan sukuk daerah berkelanjutan untuk membiayai proyek transisi, pembangunan rendah karbon, serta proyek sosial seperti sarana pendidikan, kesehatan, pemberdayaan wanita dan UMKM di tingkat daerah.

OJK bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, akan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas bagi petinggi perusahaan dan pejabat pemerintah daerah terkait penyusunan serta penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan, serta membuka ruang diskusi untuk membantu dalam penyiapan dokumen, pemenuhan standar pelaporan, dan keterlibatan dengan investor. OJK juga akan mendukung penyelenggaraan forum untuk mempertemukan emiten atau pemerintah daerah dengan perusahaan asuransi, dana pensiun, serta calon investor potensial lainnya. Upaya ini diyakini akan menciptakan *steady pipeline* obligasi dan sukuk yang kredibel serta layak investasi.

Rencana Aksi 6.2

Memfasilitasi dan mendorong investor untuk berinvestasi pada obligasi dan sukuk berkelanjutan

Mobilisasi basis investor yang luas dan terdiversifikasi untuk obligasi dan sukuk berkelanjutan akan memperkuat likuiditas pasar serta dapat menyediakan sumber permodalan jangka panjang yang andal dengan biaya kompetitif bagi penerbit. OJK akan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan *business matching*, guna meningkatkan pemahaman investor mengenai manfaat, risiko, serta dampak dari investasi pada obligasi/sukuk berkelanjutan. Skema insentif yang tepat sasaran serta kebijakan yang bersifat instruktif juga akan mendorong partisipasi investor dalam pasar utang berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kepercayaan investor, maka permintaan domestik akan semakin meluas sehingga memperkuat reputasi Indonesia sebagai *leading hub* untuk pembiayaan berkelanjutan.

Rencana Aksi 6.3

Memfasilitasi dan mendorong perdagangan obligasi dan sukuk berkelanjutan

Perdagangan pasar sekunder yang lebih dalam dan transparan akan menjadikan obligasi dan sukuk berkelanjutan sebagai produk *likuid* yang mampu menarik basis investor aktif yang lebih luas. Hal ini akan dilakukan melalui penerapan mekanisme *ESG flagging and tagging* untuk mendukung pengambilan keputusan investasi secara tepat waktu. Mekanisme tersebut akan memungkinkan intermediasi dan investor mengenali produk berkelanjutan secara cepat, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan *bid-ask spread* serta meningkatkan daya tarik dan likuiditas pasar bagi investor baru.

Rencana Aksi 6.4

Mengembangkan obligasi dan sukuk berkelanjutan yang selaras dengan perkembangan pasar global

Seiring dengan berkembangnya sektor-sektor baru serta meningkatnya peluang untuk memberikan nilai ekonomi pada aktivitas hijau, sektor keuangan global mulai mengalihkan minatnya pada basis yang lebih luas dalam penggunaan dana dan pengembangan produk utang berkelanjutan, termasuk instrumen seperti obligasi biru (*blue bonds*) atau pembiayaan berbasis alam (*debt nature financing*). Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan segmen baru tersebut untuk pembiayaan berkelanjutan sebagai bentuk pendalaman pasar. Sejalan dengan hal tersebut, OJK akan memantau perkembangan produk utang berkelanjutan serta menyelaraskan kerangka produk, taksonomi, proses penerbitan, dan mekanisme verifikasi agar sejalan dengan kebijakan dan praktik terbaik di internasional dan regional (ICMA, CBI, ASEAN, dan lain-lain). Langkah ini bertujuan untuk mendorong masuknya modal asing baru ke proyek-proyek yang berfokus pada perlindungan maritim, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pencapaian tujuan lingkungan dan sosial lainnya.

Rencana Aksi 6.5

Mengembangkan infrastruktur pendukung untuk digitalisasi obligasi dan sukuk berkelanjutan

Peningkatan akses terhadap data *real-time* dan mekanisme terdigitalisasi akan meningkatkan efisiensi penerbitan, perdagangan, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap obligasi dan sukuk berkelanjutan. Untuk itu, OJK akan mengintegrasikan sumber data ESG dan pelaporan dampak investasi berkelanjutan ke dalam bentuk digital, termasuk pengembangan *dashboard* yang memungkinkan investor memantau kinerja dampak serta tingkat kepatuhan instrumen utang berkelanjutan secara transparan. Selain itu, langkah ini dapat mencakup pengembangan sistem perdagangan digital, seperti tokenisasi dan *platform* e-IPO untuk efek berkelanjutan, guna menurunkan biaya penerbitan serta mempermudah dan memperluas akses perdagangan di pasar primer maupun sekunder.

Prioritas 7

Mengembangkan pasar saham dan produk investasi berkelanjutan

Ekosistem saham dan produk investasi berkelanjutan yang dinamis merupakan hal yang penting untuk menjembatani kinerja ESG korporasi agar menjadi peluang investasi di pasar modal. Untuk itu, produk baru yang mudah diakses melalui *digital platform* dengan hambatan masuk yang rendah (*platforms with low entry barriers*), akan dicapai melalui pembentukan *ESG benchmarks* yang kredibel dan selaras dengan standar internasional, serta penguatan kerangka regulasi untuk produk investasi berkelanjutan. Kemudahan akses investasi dan edukasi investor akan mendorong generasi muda dan investor pemula untuk berpartisipasi.

Seiring dengan perkembangan variasi produk, maka likuiditas pasar akan semakin mendalam, sehingga sinyal valuasi (*valuation signals*) akan semakin memberikan penghargaan atas kepemimpinan dalam keberlanjutan (*sustainability leadership*), dan pada akhirnya pasar ekuitas Indonesia akan menarik arus modal domestik maupun internasional yang lebih besar untuk mendukung ekonomi rendah karbon yang inklusif. Berikut rencana aksi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut:

Rencana Aksi 7.1

Mendorong pengembangan *ESG-based benchmarks* yang selaras dengan praktik terbaik internasional

ESG-based benchmark yang jelas dan dapat diandalkan akan memfasilitasi investor dalam membandingkan dan mengevaluasi strategi serta kinerja ESG perusahaan. Untuk mendukung hal tersebut, OJK akan mendorong penyedia indeks dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan lebih banyak *ESG-based benchmark* yang sesuai dengan praktik terbaik internasional. Hal ini akan memungkinkan perbandingan yang lebih efektif, baik di dalam maupun lintas industri. Keberadaan *ESG-based benchmark* akan meningkatkan transparansi pasar, mendorong masuknya investasi ESG yang berfokus pada keberlanjutan, serta memotivasi perusahaan tercatat untuk memperkuat target dan implementasi praktik ESG.

Rencana Aksi 7.2

Mengembangkan kerangka pengaturan produk investasi berkelanjutan (*sustainable funds*)

Regulasi yang jelas dan selaras dengan praktik global untuk produk investasi berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menciptakan ruang bagi inovasi dan pengembangan produk-produk baru. Sejalan dengan hal tersebut, OJK akan menyusun regulasi dan/atau panduan untuk memungkinkan pemberian label “ESG” atau “berkelanjutan” pada produk investasi. Dengan adanya regulasi atau panduan tersebut, manajer investasi memiliki acuan yang sama dalam menyusun produk investasi berkelanjutan.

Rencana Aksi 7.3

Memfasilitasi dan mendorong investor untuk berinvestasi pada ekuitas berkelanjutan dan produk investasi berkelanjutan

Partisipasi investor yang lebih luas dalam ekuitas dan produk investasi berkelanjutan akan memperdalam likuiditas serta dapat mengarahkan aliran modal ke perusahaan yang memiliki strategi berkelanjutan di Indonesia, termasuk perusahaan yang tengah mendanai proses transisi menuju keberlanjutan. Sejalan dengan itu, OJK akan mengedepankan upaya inklusif, antara lain melalui edukasi dan penguatan infrastruktur pendukung untuk mendorong keterlibatan investor baru, khususnya generasi muda dan investor retail. Insentif yang tepat sasaran dan kebijakan yang bersifat instruktif akan mendorong peningkatan investor institusional untuk berinvestasi pada ekuitas dan produk investasi berkelanjutan. Langkah tersebut akan mendukung inklusi keuangan, memperluas basis investor domestik, serta mendorong alokasi modal dari investor institusi yang lebih besar, dengan menjadikan keberlanjutan sebagai pertimbangan utama dalam strategi investasi.

Prioritas 8

Mengembangkan keuangan transisi (*transition finance*) di sektor pasar modal

Ekosistem keuangan transisi yang kredibel merupakan hal penting untuk mendukung dekarbonisasi sektor-sektor produktif sesuai dengan *Nationally Determined Contributions* (NDCs) Indonesia, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pembentukan kerangka kebijakan yang jelas dan mendefinisikan kegiatan transisi yang memenuhi syarat, mewajibkan pengungkapan rencana transisi yang selaras dengan ilmiah, serta mendukung pelaku pasar dalam menyusun skema obligasi dan sukuk berlandaskan keberlanjutan atau transisi. Dengan menjelaskan bagaimana perusahaan di sektor *hard-to-abate* berupaya menurunkan emisi karbon dan dapat memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan, keuangan transisi akan membuka sumber modal baru dan mengalirkan pembiayaan menuju transisi ekonomi Indonesia. Berikut rencana aksi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut:

Rencana Aksi 8.1

Mengembangkan kerangka kebijakan keuangan transisi

Ketentuan keuangan transisi dapat memperluas akses pendanaan bagi perusahaan dengan intensitas karbon tinggi yang memiliki komitmen pada arah dekarbonisasi yang kredibel. Untuk mendukung hal tersebut, OJK akan menerbitkan panduan rencana transisi yang memuat kriteria kelayakan, target berbasis ilmiah, bentuk pengungkapan, serta langkah-langkah verifikasi. Dengan inisiatif ini, kreditur dan investor dapat menilai risiko transisi dengan lebih baik, sementara perusahaan dapat memperoleh pendanaan untuk pengurangan emisi secara bertahap. Selain itu, OJK akan mengembangkan instrumen pendanaan transisi dalam rangka memfasilitasi industri *hard-to-abate* untuk mendapatkan pendanaan di pasar modal.

Rencana Aksi 8.2

Mendorong emiten, perusahaan publik, dan pelaku pasar modal lainnya untuk menyusun dan mengungkapkan rencana transisi

Rencana transisi yang jelas akan memberikan gambaran bagi investor mengenai bagaimana perusahaan akan mengurangi emisi dan tetap kompetitif. OJK akan mendorong emiten, perusahaan publik, dan pelaku pasar modal lainnya untuk menyusun dan mengungkapkan rencana transisi, melalui penerbitan panduan rencana transisi serta penyelenggaraan *capacity building*. Inisiatif ini akan mendukung kepatuhan terhadap kebijakan dan kerangka regulasi keuangan transisi yang ditetapkan.

Prioritas 9

Mendorong partisipasi di bursa karbon

Ekosistem bursa karbon yang likuid sangat penting untuk mengarahkan pembiayaan swasta ke proyek dekarbonisasi serta mendukung perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan target emisi karbon. Sejalan dengan hal tersebut, OJK akan berperan aktif dalam mendukung IDX dan pemangku kepentingan dalam ekosistem bursa karbon untuk penguatan infrastruktur dan pengembangan bursa karbon Indonesia. Bursa yang berfungsi dengan baik akan membuka aliran pendapatan bagi pengembang proyek, memperluas penawaran produk pembiayaan berkelanjutan di Indonesia, dan mempercepat pencapaian tujuan iklim serta transisi nasional.

Rencana Aksi 9.1

Mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan unit karbon di Bursa Karbon Indonesia

Untuk perdagangan karbon melalui bursa karbon, OJK akan merumuskan pendekatan strategis yang terkoordinasi melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Pendekatan ini akan mencakup penguatan ekosistem bursa karbon, meliputi kerangka regulasi, pengawasan, edukasi, dan infrastruktur pendukung. Selain itu, praktik yang transparan dan sistem monitoring yang komprehensif akan mempercepat proses verifikasi kepatuhan, meningkatkan partisipasi domestik maupun internasional, serta memperkuat *price signals* di pasar karbon Indonesia.



PILAR III

MENDORONG PARTISIPASI DALAM PASAR MODAL BERKELANJUTAN

“Upaya untuk mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.”

Upaya untuk mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan peran SROs, pengembangan berbagai stimulus, pengembangan profesi terkait, serta peningkatan literasi dan edukasi pasar modal berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut akan mendukung operasionalisasi dan mendorong perubahan perilaku pelaku pasar, membangun kepercayaan, sehingga memperdalam pasar modal berkelanjutan Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pilar ini dibagi ke dalam prioritas-prioritas berikut:

Prioritas 10

Mendorong peran SROs dalam mengembangkan pasar modal berkelanjutan

Kredibilitas pasar modal berkelanjutan sangat bergantung pada keberadaan infrastruktur dan proses yang andal dalam mengintegrasikan faktor-faktor ESG. Sebagai bagian dari ekosistem pasar modal, SROs berperan penting dalam mendorong dan memberi insentif kepada pelaku pasar yang terlibat dalam penerbitan dan perdagangan produk pasar modal berkelanjutan. OJK bekerja sama dengan SROs, seperti BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maupun Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), untuk mendorong perannya dalam meningkatkan integrasi keberlanjutan di pasar modal.

Upaya ini akan dilaksanakan melalui penyederhanaan proses pencatatan, perdagangan, dan *settlement* untuk obligasi dan sukuk berkelanjutan, penguatan digitalisasi pelaporan alokasi dan dampak investasi berkelanjutan, penetapan standar bagi praktik keuangan berkelanjutan, penguatan edukasi investor, serta promosi produk ESG. Seluruh upaya tersebut akan mengurangi hambatan penerbitan, memperluas jangkauan investor, dan memperkuat pertumbuhan pasar modal berkelanjutan Indonesia yang berintegritas tinggi. Berikut rencana aksi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut:

Rencana Aksi 10.1

Mendorong peran SROs dalam menyediakan infrastruktur pendukung pasar modal berkelanjutan



Pemanfaatan data digital akan membuat produk berkelanjutan lebih kredibel dan mudah dipasarkan. Untuk mendukung hal tersebut, OJK bekerja sama dengan SROs mendorong penggunaan perangkat digital yang meningkatkan transparansi dan *traceability* aktivitas pasar modal berkelanjutan. Misalnya, OJK dan SROs dapat mengembangkan pelabelan digital untuk obligasi dan sukuk serta alat monitoring menyeluruh (*end-to-end tracking tools*) dalam sistem pencatatan dan pasca-transaksi, sehingga emiten memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi penggunaan dana (*use-of-proceeds*) dan memfasilitasi investor untuk memantau investasinya pada obligasi dan sukuk tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko *greenwashing* dan meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, OJK bersama SROs akan mengembangkan infrastruktur pendukung untuk pelaporan keberlanjutan serta pusat data keberlanjutan, guna memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan di pasar modal.

Rencana Aksi 10.2

Mendorong peran SROs dalam mempercepat pertumbuhan pasar modal berkelanjutan

Peningkatan literasi investor menjadi prasyarat penting untuk menjaga permintaan yang stabil dan integritas pasar. Untuk mendukung hal tersebut, OJK bersama dengan SROs akan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang ada guna meningkatkan pemahaman investor mengenai peluang dan risiko investasi berkelanjutan. Selain itu peran SROs akan diperkuat melalui inisiatif yang sudah ada, seperti diskon biaya pencatatan obligasi dan sukuk berlandaskan keberlanjutan, indeks ESG, Bursa Karbon, serta partisipasi dalam *United Nation Sustainable Stock Exchanges* (UN SSE).

Upaya peningkatan literasi ESG serta perluasan partisipasi investor, baik ritel maupun institusi, akan dilakukan melalui penyelenggaraan webinar, seminar, dan program edukasi tematik keuangan berkelanjutan. Selain itu, inisiatif ini juga mencakup penyediaan program *capacity building* bagi calon emiten untuk mendorong pertumbuhan penerbitan obligasi dan/atau sukuk berkelanjutan, serta pengembangan instrumen berkelanjutan baru guna memperkaya pilihan investor dalam mengalokasikan dana pada produk berkelanjutan.

Prioritas 11

Mengembangkan berbagai jenis stimulus untuk mendorong pertumbuhan pasar modal berkelanjutan

Perpaduan insentif dalam bentuk finansial dan relaksasi regulasi akan menjadikan keuangan berkelanjutan sebagai pilihan yang menarik bagi emiten maupun investor, sekaligus tetap menjaga perlindungan terhadap investor. Insentif tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya pendanaan proyek keberlanjutan dan transisi sehingga memperluas *pipeline* penerbitan produk berkelanjutan dan meningkatkan likuiditas pasar. Berikut rencana aksi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut:

Rencana Aksi 11.1

Mengembangkan insentif untuk mendorong integrasi ESG dalam pengambilan keputusan strategis, keuangan, dan investasi oleh pelaku pasar modal

Penerapan insentif yang tepat sasaran dapat mendorong pelaku pasar modal untuk mengintegrasikan ESG dalam proses pengambilan keputusan secara efisien dan dengan biaya rendah. OJK akan memformulasikan skema insentif bagi pelaku pasar modal, termasuk untuk mendorong penerbitan dan perdagangan obligasi/sukuk berkelanjutan, seperti potongan biaya untuk penerbitan, penghargaan bagi perusahaan yang mengintegrasikan ESG ke seluruh aspek bisnisnya, serta insentif potensial lainnya. Insentif ini diharapkan dapat memperluas partisipasi di pasar modal berkelanjutan.

Rencana Aksi 11.2

Mengembangkan penyesuaian kebijakan untuk mendorong pertumbuhan pasar modal yang stabil dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan perlindungan investor

Pengurangan hambatan regulasi bagi pelaku pasar modal dapat membantu menyeimbangkan inovasi dan pengembangan bisnis dengan persyaratan pengelolaan risiko, sehingga produk keuangan berkelanjutan lebih mudah masuk ke pasar dan praktik berkelanjutan lebih cepat diadopsi. Untuk mendukung hal tersebut, OJK akan merancang penyesuaian regulasi dan kebijakan dalam bentuk relaksasi yang proporsional untuk mendorong pertumbuhan pasar modal berkelanjutan sekaligus menjaga perlindungan investor secara ketat. Penyesuaian kerangka regulasi dan kebijakan ini akan mempercepat proses *time-to-market*, menurunkan biaya kepatuhan, mendorong mobilisasi modal, serta memperkuat stabilitas pasar.

Prioritas 12

Mengembangkan profesi pendukung lainnya

Seiring dengan meningkatnya arus pendanaan berkelanjutan serta semakin ketatnya persyaratan regulasi untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangan, industri jasa keuangan menjadi lebih dinamis. Sejalan dengan dinamika tersebut, berbagai aktivitas bisnis dan profesi baru hadir untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan seperti *external reviewer* atau penyedia revidu eksternal dan asuransi keberlanjutan. Berikut rencana aksi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut:

Rencana Aksi 12.1

Mengembangkan regulasi dan panduan bagi profesi pendukung lainnya yang terkait dengan pasar modal berkelanjutan

Munculnya aktivitas baru di bidang keberlanjutan, baik yang didorong oleh persyaratan regulasi maupun permintaan pasar, menuntut adanya kerangka regulasi yang memastikan bahwa profesi pendukung dalam bidang keberlanjutan memenuhi standar integritas dan profesionalisme yang tinggi, serta mengutamakan kepentingan investor.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 mengamanahkan OJK serta Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengatur profesi yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan. Untuk itu, OJK akan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk mendukung tujuan ini dengan menetapkan kebijakan atau regulasi mengenai jasa asuransi (*assurance providers*), yang memberikan asuransi atas laporan keberlanjutan lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, peran *external reviewer* yang bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian kerangka produk tematik berkelanjutan dengan standar internasional dan TKBI juga akan diatur dalam kebijakan dan regulasi tersebut. Upaya ini akan membantu meningkatkan jumlah profesional yang berkualifikasi untuk melaksanakan kegiatan dalam pasar modal berkelanjutan.

Prioritas 13

Meningkatkan kapasitas dan kesadaran mengenai pentingnya pasar modal berkelanjutan

Perkembangan pasar modal berkelanjutan ditopang oleh pemahaman teknis para profesional mengenai bisnis dan implikasi operasional dari transaksi keuangan berkelanjutan, serta nilai tambahnya bagi masyarakat luas. Untuk mendukung hal tersebut, OJK bersama-sama dengan *stakeholder* akan memfasilitasi program pelatihan, sertifikasi, dan *peer-learning* serta program literasi nasional yang berperan dalam meningkatkan pemahaman mengenai keuntungan investasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, upaya-upaya ini akan menumbuhkan permintaan terhadap produk keuangan berkelanjutan, mendorong minat dalam mengembangkan proyek keberlanjutan yang mengintegrasikan ESG, serta mengarahkan aliran modal menuju proyek hijau dan transisi di Indonesia. Berikut rencana aksi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut:

Rencana Aksi 13.1

Meningkatkan ketersediaan *capacity building* yang dibutuhkan oleh pelaku pasar dan regulator

Penguatan kemampuan dan kapasitas profesional sangat vital untuk mendorong transaksi, penetapan harga, dan pengawasan transaksi ESG sesuai standar regulasi dan praktik terbaik internasional. OJK bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, akan merancang program pelatihan komprehensif bagi emiten, intermediari keuangan, dan regulator, serta mengembangkan kurikulum dan sertifikasi bersama para ahli dan institusi terkait. Inisiatif ini akan berkontribusi dalam membangun sumber daya profesional yang terampil (*pool of skilled professionals*), meningkatkan kualitas transaksi, serta menurunkan risiko *greenwashing* dan risiko kepatuhan di seluruh pasar modal Indonesia.

Rencana Aksi 13.2

Meningkatkan literasi dan edukasi di masyarakat

Masyarakat dan investor ritel diharapkan menjadi pendorong utama untuk permintaan yang stabil terhadap produk keberlanjutan. Untuk itu, OJK bersama para pemangku kepentingan akan menyelenggarakan kegiatan edukasi nasional yang komprehensif meliputi kuliah umum, diskusi panel, seminar, serta berbagai sarana promosi lainnya. Upaya ini akan mendukung peningkatan pemahaman di kalangan masyarakat, membangun kepercayaan terhadap label ESG, dan memperluas basis investor untuk proyek hijau dan transisi di Indonesia.



PILAR IV

MEMPERKUAT KOLABORASI UNTUK PENGEMBANGAN PASAR MODAL BERKELANJUTAN

“Membangun kolaborasi di tingkat lokal dan nasional, serta memperkuat kerja sama internasional, akan membantu penerapan praktik terbaik dan pengembangan pasar modal berkelanjutan di Indonesia.”

Tujuan dari pilar ini adalah untuk memastikan terciptanya kolaborasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pengembangan pasar modal berkelanjutan. OJK membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan secara efektif untuk mengembangkan ekosistem pasar modal berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dapat dicapai melalui kolaborasi dengan pemerintah, kementerian, pelaku pasar, mitra pembangunan baik lokal maupun global, serta pemangku kepentingan lainnya.

Membangun kolaborasi di tingkat lokal dan nasional, serta memperkuat kerja sama internasional, akan membantu penerapan praktik terbaik dan pengembangan pasar modal berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi formal maupun informal akan memastikan pemangku kepentingan dapat berdiskusi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman terkait berbagai langkah dan tindakan yang diperlukan untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan. Penguatan kolaborasi tersebut akan membantu terciptanya transparansi, kredibilitas, ketahanan, dan stabilitas di pasar modal berkelanjutan Indonesia.

Prioritas 14

Mendorong koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga

Koordinasi di tingkat daerah dan nasional akan membantu OJK serta Kementerian dan Lembaga untuk lebih memahami ekosistem pasar modal berkelanjutan dan tindakan-tindakan yang dapat mendorong pengembangannya. Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga ini pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan dan mengharmonisasikan kebijakan antar kementerian dan otoritas, serta membangun kolaborasi dalam mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam langkah-langkah berikut:

Rencana Aksi 14.1

Membangun koordinasi untuk menciptakan keselarasan regulasi di antara kementerian, lembaga, dan regulator

Membangun koordinasi yang kuat akan membantu OJK serta Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengembangkan pasar modal berkelanjutan. Koordinasi ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang selaras guna mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Koordinasi di sektor keuangan akan dilakukan melalui Komite Keuangan Berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 224, yang menetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), OJK, dan Bank Indonesia untuk membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan dengan Kemenkeu sebagai koordinator. Peran dari Komite Keberlanjutan sesuai dengan pasal 223 yaitu meliputi koordinasi dalam menyusun dan menerapkan strategi, kebijakan, dan program keuangan berkelanjutan; mengoptimalkan dukungan kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial; pengembangan basis data dan infrastruktur pendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan; dan melakukan koordinasi dalam menyusun taksonomi berkelanjutan.

Selain peran-peran tersebut, khususnya di sektor pasar modal, kegiatan koordinasi antara Kementerian dan Lembaga terkait akan mencakup, namun tidak terbatas pada, upaya khusus untuk menyelaraskan dan mengharmonisasikan kebijakan, regulasi, serta skema insentif fiskal yang memengaruhi kegiatan keuangan dan pasar modal berkelanjutan, sehingga para penerbit, investor, dan pengawas dapat beroperasi dalam kerangka aturan yang terpadu dan konsisten. Kerangka hukum yang terpadu akan mengatasi kesenjangan pengaturan dan memudahkan implementasi kebijakan serta penegakan hukum untuk pasar modal berkelanjutan yang berjalan dengan baik (*well-functioning*). Selain itu, dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional, OJK bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait berkoordinasi untuk membangun Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dan ekosistem perdagangan karbon nasional, serta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka mengakomodir mandat di dalam Peraturan Presiden dimaksud.

Rencana Aksi 14.2

Membangun kolaborasi antara OJK dan pemangku kepentingan nasional untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan

OJK menjalin kolaborasi dalam kegiatan edukasi, peningkatan pengetahuan, dan pengembangan kapasitas bersama kementerian, *Self-Regulatory Organizations* (SROs), asosiasi industri, serta pelaku pasar terkait lainnya. Selain itu, kegiatan bersama tersebut dapat mencakup kegiatan peningkatan kesadaran publik, forum diskusi untuk membahas dan memprioritaskan isu-isu yang sedang berkembang, *business matching* bagi penerbit dan investor, portal data bersama dan inventarisasi data, serta program penghargaan. Dengan penguatan pengetahuan serta menggerakkan pemangku kepentingan dari sektor publik maupun swasta, permintaan dan penawaran terhadap instrumen pembiayaan berkelanjutan dapat tumbuh secara signifikan, sekaligus mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pasar modal berkelanjutan.

Prioritas 15

Membangun kolaborasi dengan lembaga internasional

Koordinasi di tingkat internasional akan menjadi hal yang penting untuk menyelaraskan dan/atau memastikan interoperabilitas pasar modal berkelanjutan Indonesia sejalan dengan standar global, yang sangat berperan dalam menarik investasi internasional serta menyalurkan pembiayaan berkelanjutan yang lebih terjangkau ke pasar domestik. Selain itu, keterlibatan OJK dalam organisasi multinasional seperti *ASEAN Capital Markets Forum* (ACMF), *the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of Organization of the Islamic Cooperation* (COMCEC), *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), memungkinkan OJK untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan standar keuangan berkelanjutan dan berbagai inisiatif lainnya dalam mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan. Kolaborasi internasional dapat dilakukan melalui rencana aksi sebagai berikut:

Rencana Aksi 15.1

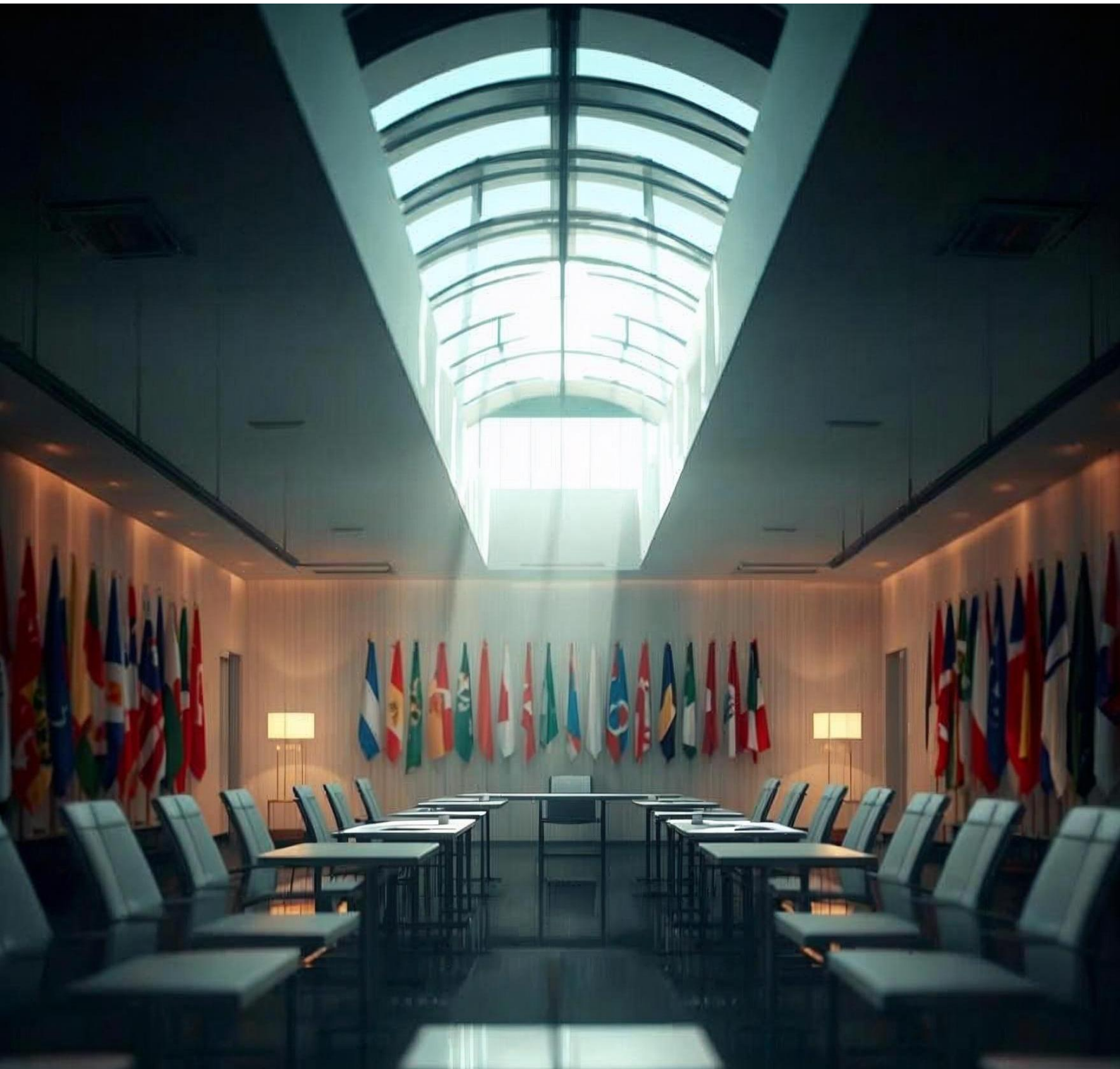
Mengembangkan dan memperkuat kolaborasi bilateral dan multilateral dalam pengembangan pasar modal berkelanjutan

Partisipasi berkelanjutan dalam forum bilateral dan multilateral akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan berkelanjutan global. Keterlibatan aktif ini juga akan membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mengoptimalkan mekanisme pembelajaran antar negara (*peer-learning*), memperoleh bantuan teknis, serta menyelaraskan kebijakan. Selain itu, melalui kolaborasi dengan regulator dan bursa efek asing, keikutsertaan dalam forum global, serta penyelenggaraan pelatihan, Indonesia dapat mengakses *technical assistance* yang esensial untuk membekali emiten, investor, dan pengawas. Dengan demikian, regulasi nasional dapat diselaraskan dengan standar internasional, sekaligus memperkuat pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia, terutama di pasar modal.

Rencana Aksi 15.2

Membangun kolaborasi dengan lembaga internasional untuk memastikan interoperabilitas antara kerangka regulasi Indonesia dan standar internasional

Melalui keanggotaan dalam organisasi global seperti ACMF, IOSCO, ICMA, dan OECD, Indonesia dapat bersama-sama merancang (*co-design*) program bantuan teknis dan *shared tools*, seperti *template* pengungkapan ESG yang berlaku di beberapa yurisdiksi. Selain itu, Indonesia dapat terlibat dalam penyusunan kerangka regulasi atau standar yang berlaku di wilayah regional ataupun internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan interoperabilitas regulasinya dengan standar internasional, serta menyediakan kejelasan dan perbandingan yang dibutuhkan investor asing dalam investasi berkelanjutan lintas batas.





ENABLER



Kepemimpinan dan Komitmen

Implementasi *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan dimulai dengan adanya kepemimpinan yang kuat dan komitmen jangka panjang dari regulator, Kementerian dan Lembaga yang relevan dan pemangku kepentingan terkait terhadap keuangan berkelanjutan dan nilai-nilai yang mendasarinya. Kepemimpinan dan komitmen tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan *roadmap* ini dalam mencapai keluaran (*outcomes*) yang ditetapkan pada setiap prioritas, sekaligus menciptakan stabilitas regulasi. Stabilitas regulasi jangka panjang memberikan keyakinan yang dibutuhkan investor dan pelaku pasar untuk mendorong terbentuknya pasar modal berkelanjutan yang kuat dan berdaya saing.



SDM yang Berkualitas dan Memiliki Kesadaran

Untuk memastikan implementasi *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan yang efektif, penting bagi seluruh pemangku kepentingan – regulator dan pelaku pasar modal – untuk dibekali dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam keuangan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui pembelajaran berkelanjutan dan inisiatif *capacity building*, penetapan standar kompetensi, serta pembentukan budaya perusahaan yang berorientasi pada tujuan yang memotivasi dan memberdayakan tenaga kerja untuk mendukung pengembangan pasar berkelanjutan.

Dari sisi regulator, sumber daya manusia ini diperlukan untuk mendukung pengembangan dan pengawasan implementasi keuangan berkelanjutan oleh pelaku pasar. Sementara dari sisi pelaku pasar modal, sumber daya manusia diperlukan untuk membantu penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sebagaimana disyaratkan oleh regulator dan diharapkan oleh investor.



Infrastruktur Teknologi Informasi

Teknologi yang andal merupakan faktor pendukung yang penting untuk menciptakan pengawasan dan perizinan yang efektif, pengelolaan pusat data keberlanjutan yang terintegrasi, ketersediaan data yang dapat diperbandingkan secara *real-time*, serta pengambilan keputusan keuangan dan ekonomi.

Perluasan digitalisasi pada proses bisnis di pasar modal telah menciptakan peningkatan dalam produktivitas pasar yang didukung oleh perlindungan keamanan siber, guna menjaga keamanan dan integritas informasi pasar. Dengan demikian, infrastruktur teknologi yang terintegrasi dapat menjadi fondasi bagi pasar modal berkelanjutan yang tangguh dan responsif. Lebih lanjut, bagi pelaku pasar modal, resiliensi infrastruktur teknologi informasi juga dibutuhkan untuk mendorong implementasi keuangan berkelanjutan baik bagi regulator maupun pelaku pasar.



Tata Kelola yang Baik

Tata kelola yang baik memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi keuangan berkelanjutan yang memastikan bahwa pelaku pasar modal mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam aktivitas bisnis. Selain itu, juga secara langsung memengaruhi kematangan keberlanjutan suatu entitas karena membentuk bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan, dipantau, dan dipertanggungjawabkan untuk mencapai dampak lingkungan dan sosial yang diharapkan.

Melalui kewenangannya, regulator memainkan peranan yang penting dalam memastikan bahwa tata kelola telah diimplementasikan sepenuhnya oleh pelaku pasar. Oleh karena itu, pelaku pasar harus bertindak independen, dapat dipercaya dan bertanggung jawab serta harus bertindak transparan dan adil kepada pemangku kepentingan terkait untuk menciptakan nilai jangka panjang.

ROADMAP PASAR MODAL BERKELANJUTAN INDONESIA 2026 - 2030

PILAR I

MEMPERKUAT FONDASI PASAR MODAL BERKELANJUTAN

Prioritas	Rencana Aksi	Output
Prioritas 1 Mendorong penggunaan taksonomi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pasar modal berkelanjutan	1.1 Mengembangkan kebijakan pasar modal berkelanjutan yang sejalan dengan TKBI	Kebijakan yang sejalan dengan TKBI
	1.2 Mendorong penggunaan TKBI dalam praktik pasar modal berkelanjutan	Penggunaan TKBI dalam aktivitas bisnis pasar modal
Prioritas 2 Mengintegrasikan ESG dalam aktivitas bisnis serta pengungkapan keberlanjutan oleh emiten dan perusahaan publik	2.1 Mendorong emiten dan perusahaan publik untuk mengintegrasikan ESG dalam tata kelola, strategi, pengambilan keputusan investasi, dan aktivitas bisnis	Kebijakan dan regulasi yang mendorong penerapan nilai ESG oleh emiten dan perusahaan publik
	2.2 Menyusun regulasi dan panduan untuk pelaksanaan pengungkapan keberlanjutan bagi emiten dan perusahaan publik	Peraturan dan panduan untuk pengungkapan keberlanjutan
	2.3 Mengembangkan regulasi dan panduan mengenai manajemen risiko iklim bagi emiten dan perusahaan publik	Regulasi dan panduan mengenai manajemen risiko iklim untuk emiten dan perusahaan publik

Prioritas	Rencana Aksi	Output
Prioritas 3 Mengintegrasikan ESG dalam aktivitas bisnis serta pengungkapan keberlanjutan oleh pelaku pasar modal lainnya	3.1 Mendorong pelaku pasar modal lainnya untuk mengintegrasikan ESG dalam tata kelola, strategi, pengambilan keputusan investasi, dan aktivitas bisnis	Kebijakan yang mendorong implementasi nilai ESG oleh pelaku pasar
	3.2 Menyusun regulasi dan panduan pengungkapan keberlanjutan bagi pelaku pasar modal lainnya	Peraturan dan panduan pengungkapan keberlanjutan untuk pelaku pasar lainnya
	3.3 Menyusun panduan prinsip <i>stewardship</i> dan/atau prinsip investasi bertanggung jawab bagi manajer investasi	Panduan implementasi <i>stewardship principles</i> dan investasi bertanggung jawab untuk manajer investasi
	3.4 Mengembangkan regulasi dan panduan mengenai manajemen risiko iklim bagi pelaku pasar modal lainnya	Regulasi dan panduan mengenai manajemen risiko iklim untuk pelaku pasar
Prioritas 4 Mengembangkan ekosistem data untuk mendukung integrasi ESG dalam pasar modal	4.1 Mengembangkan kerangka kebijakan dan infrastruktur pendukung untuk membangun ekosistem data terintegrasi	Pusat data pasar modal berkelanjutan yang terintegrasi
Prioritas 5 Memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap integrasi ESG dalam aktivitas pelaku pasar modal	5.1 Memperkuat kegiatan pengawasan dan pendampingan penerapan keuangan berkelanjutan di sektor pasar modal	Panduan pengawasan atas kepatuhan atas prinsip keberlanjutan
	5.2 Mengembangkan <i>supervisory tools</i> untuk memperkuat penilaian atas klaim ESG oleh pelaku pasar modal	<i>Tools</i> pengawasan untuk mencegah <i>greenwashing</i>

PILAR II

MENUMBUHKAN AKTIVITAS PASAR MODAL BERKELANJUTAN

Prioritas	Rencana Aksi	Output
Prioritas 6 Mengembangkan pasar obligasi dan sukuk berkelanjutan	6.1 Memfasilitasi dan mendorong penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan oleh korporasi dan pemerintah daerah	Aktivitas yang mendorong penerbitan EBUS Berlandaskan Keberlanjutan antara lain <i>capacity building, coaching, business matching</i> , dan lainnya
	6.2 Memfasilitasi dan mendorong investor untuk berinvestasi pada obligasi dan sukuk berkelanjutan	Aktivitas yang mendorong investasi pada EBUS Berlandaskan Keberlanjutan
	6.3 Memfasilitasi dan mendorong perdagangan obligasi dan sukuk berkelanjutan	Aktivitas yang mendorong perdagangan di pasar sekunder
	6.4 Mengembangkan obligasi dan sukuk berkelanjutan yang selaras dengan perkembangan pasar global	EBUS berlandaskan keberlanjutan jenis lainnya seperti <i>nature finance, blue bonds/sukuk</i> , dan lainnya
	6.5 Mengembangkan infrastruktur pendukung untuk digitalisasi obligasi dan sukuk berkelanjutan	Digitalisasi EBUS berlandaskan keberlanjutan
Prioritas 7 Mengembangkan pasar saham dan produk investasi berkelanjutan	7.1 Mendorong pengembangan <i>ESG-based benchmarks</i> yang selaras dengan praktik terbaik internasional	Penerbitan indeks berbasis ESG baru
	7.2 Mengembangkan kerangka pengaturan produk investasi berkelanjutan (<i>sustainable funds</i>)	Kerangka kebijakan dan pengaturan produk investasi berkelanjutan

Prioritas	Rencana Aksi	Output
	7.3 Memfasilitasi dan mendorong investor untuk berinvestasi pada ekuitas berkelanjutan dan produk investasi berkelanjutan	Aktivitas yang mendorong investasi pada produk investasi dan ekuitas berkelanjutan
Prioritas 8 Mengembangkan keuangan transisi (<i>transition finance</i>) di sektor pasar modal	8.1 Mengembangkan kerangka kebijakan keuangan transisi	Peraturan dan/atau panduan terkait penyusunan rencana transisi (<i>transition plan</i>) dan penerbitan <i>transition bond/sukuk</i>
	8.2 Mendorong emiten, perusahaan publik, dan pelaku pasar modal lainnya untuk menyusun dan mengungkapkan rencana transisi	Aktivitas untuk mendorong pelaku pasar menyusun <i>transition plan</i> seperti <i>workshop, coaching</i> , dan lainnya
Prioritas 9 Mendorong partisipasi di bursa karbon	9.1 Mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan unit karbon di Bursa Karbon Indonesia	Inisiatif untuk mendorong pertumbuhan partisipan dalam bursa karbon

PILAR III

MENDORONG PARTISIPASI DALAM PASAR MODAL BERKELANJUTAN

Prioritas	Rencana Aksi	Output
Prioritas 10 Mendorong peran SROs dalam mengembangkan pasar modal berkelanjutan	10.1 Mendorong peran SROs dalam menyediakan infrastruktur pendukung pasar modal berkelanjutan	Infrastruktur pasar modal berkelanjutan yang diinisiasi oleh SROs
	10.2 Mendorong peran SROs dalam mempercepat pertumbuhan pasar modal berkelanjutan	Aktivitas yang mendorong pertumbuhan pasar modal berkelanjutan
Prioritas 11 Mengembangkan berbagai jenis stimulus untuk mendorong pertumbuhan pasar modal berkelanjutan	11.1 Mengembangkan insentif untuk mendorong integrasi ESG dalam pengambilan keputusan strategis, keuangan, dan investasi oleh pelaku pasar modal	Insentif pendukung pasar modal berkelanjutan
	11.2 Mengembangkan penyesuaian kebijakan untuk mendorong pertumbuhan pasar modal yang stabil dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan perlindungan investor	Kebijakan relaksasi untuk pasar modal berkelanjutan
Prioritas 12 Mengembangkan profesi pendukung lainnya	12.1 Mengembangkan regulasi dan panduan bagi profesi pendukung lainnya yang terkait dengan pasar modal berkelanjutan	Peraturan dan panduan untuk profesi terkait keuangan berkelanjutan
Prioritas 13 Meningkatkan kapasitas dan kesadaran mengenai pentingnya pasar modal berkelanjutan	13.1 Meningkatkan ketersediaan <i>capacity building</i> yang dibutuhkan oleh pelaku pasar dan regulator	<i>Workshop, training</i> , sarana pembelajaran bagi pelaku pasar, masyarakat, dan regulator
	13.2 Meningkatkan literasi dan edukasi di masyarakat	Aktivitas literasi untuk akademisi, masyarakat, komunitas, dan lainnya

PILAR IV

MEMPERKUAT KOLABORASI UNTUK PENGEMBANGAN PASAR MODAL BERKELANJUTAN


Prioritas	Rencana Aksi	Output
Prioritas 14 Mendorong koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga	14.1 Membangun koordinasi untuk menciptakan keselarasan regulasi di antara kementerian, lembaga, dan regulator	Forum pertemuan dan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga dalam rangka melakukan harmonisasi kebijakan dan kerangka pengaturan termasuk pembangunan infrastruktur perdagangan karbon, antara lain Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)
	14.2 Membangun kolaborasi antara OJK dan pemangku kepentingan nasional untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan	Kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> domestik untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan
Prioritas 15 Membangun kolaborasi dengan lembaga internasional	15.1 Mengembangkan dan memperkuat kolaborasi bilateral dan multilateral dalam pengembangan pasar modal berkelanjutan	Hubungan kelembagaan dan kolaborasi dengan lembaga internasional dalam mengembangkan pasar modal berkelanjutan
	15.2 Membangun kolaborasi dengan lembaga internasional untuk memastikan interoperabilitas antara kerangka regulasi Indonesia dan standar internasional	Keterlibatan dalam penyusunan standar atau <i>framework</i> pada lembaga internasional



Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710 Indonesia

 (021) 2960 0000

 humas@ojk.go.id | dbms@ojk.go.id